



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, DAN
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: RDP
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 18 Februari 2020
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d. 16.00 WIB
Tempat	: Ruang rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) dilanjutkan oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG)
Acara	: Membahas: 1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; 2. Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020; dan 3. Lain-lain.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 43 dari 54 orang Anggota Komisi IV DPR RI dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 12 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.

3. Drs. I Made Urip, M.Si.
4. Ir. Effendi Sianipar
5. Ono Surono, S.T.
6. H. Yadi Srimulyadi
7. Ir. Mindo Sianipar
8. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
9. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
10. DR. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
11. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
12. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

6 Dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H. /Wakil Ketua
2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. Firman Soebayo, S.E., M.H.
4. Ichsan Firdaus
5. Budhy Setiawan
6. Alien Mus

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

5 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua
2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
5. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

3 dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
2. H. Sulaeman L. Hamzah
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

5 dari 5 orang Anggota

1. H. Muntarom, S.Sos.
2. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
3. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
4. Edward Tannur, S.H.
5. Drs. H. Ibnu Multazam

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Hj. Nur'Aeni, S.Sos, M.Si.
3. Muslim, S.HI., M.M.
4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

4 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet.
2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

2 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.
2. Ema Umiyattul Chusnah

10. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah

1. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
2. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. Dr. Agus Suherman (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Bisa kita mulai?

Tolong daftar absen. Berapa banyak yang sudah hadir.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Pertama-tama mohon maaf atas terlambatnya pagi ini dikarenakan ada sesuatu hal yaitu perihal mengenai Dapil Anggota.

Kita mulai ya.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Sekretaris Jenderal, Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Perikanan,
Kementerian Perikanan dan Kelautan beserta jajarannya,
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai jadwal rapat-rapat Dewan Perwakilan Republik Indonesia Masa Persidangan II, Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Bamus pada tanggal 16 Desember 2019 dan keputusan Rapat Internal pada tanggal 15 Januari pada hari ini Selasa, 18 Februari 2020 Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat di Sekjen, Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan, dan dalam rangka membahas anggaran rencana kerja Tahun 2020, serta perubahan komposisi pagu anggaran Tahun 2020, serta yang lain-lain.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV saat ini Rapat Dengar Pendapat Komisi IV telah dihadiri dan ditandatangani oleh 33 Anggota dari 54 Anggota dan terdiri dari 8 Fraksi.

Untuk itu sesuai dengan keputusan Pasal 246 dan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, RDP hari ini dinyatakan terbuka untuk umum.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Rapat Dengar Pendapat hari ini dimulai pukul 11.00 WIB, akan diakhiri pada pukul 17.00. Dan apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar rapat,
2. Penjelasan Eselon I Kementerian Kelautan Perikanan terhadap agenda rapat,
3. Tanggapan Anggota Komisi IV,
4. Jawaban Eselon I KKP,
5. Kesimpulan,
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materi dan spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu negara perlu melakukan upaya, tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia seutuhnya. Pemerintah pada periode ke-2 ini telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan peluang kerja dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Terutama dalam sektor kelautan, perikanan karena sektor ini sepenuhnya belum dilaksanakan secara optimal. Mendorong pengembangan usaha perikanan yang bersifat mikro kecil, seperti membantu usaha penangkapan layanan tangkap, pembudidaya ikan baik benih, pakan, obat-obatan, dan penyakit ikan lainnya, serta pengolah dan pemasaran hasil perikanan. Seperti abon ikan, kerupuk udang, dendeng, dan lain-lain, serta peningkatan konsumsi ikan guna mencetak sumber daya manusia yang lebih sehat, dan kuat untuk menghadapi era digital saat ini dan masa yang akan datang. Terkait hal tersebut maka Komisi IV meminta Pemerintah sq Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengambil kebijakan ataupun langkah-langkah program strategis dalam meningkatkan ekspor perikanan Indonesia. Yang juga selaras dengan menciptakan peluang usaha di sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan pengembangan dan investasi. Pengembangan serta peningkatan kualitas usaha perikanan yang berskala mikro kecil dapat meningkatkan pertumbuhan perputaran ekonomi yang stabil, konsisten terhadap rakyat kecil.

Bapak/Ibu yang saya muliakan,

Demikian pengantar ini kami sampaikan. Selanjutnya nanti kami minta Eselon 1 Pak Sekjen untuk menjelaskan hal-hal yang terkait diatas. Disini saya perlu jelaskan ada beberapa program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang untuk rakyat bukan untuk Anggota Komisi IV. Contohnya, ada program bioflog, ada juga lain-lain nanti tinggal dibahas. Tadi juga sudah saya jelaskan baik kepada Eselon 1 maupun yang lalu sudah saya jelaskan. Kementerian Kelautan mendapatkan angka yang paling kecil diantara mitra kita. Kalau tidak salah hanya 6,4 sekian. Yang beberapa tahun yang lalu pernah mencapai 11 koma sekian Triliun. Maka saya berharap kepada Anggota Komsii IV yang Badan Anggaran agar 2021 kita bersama-sama mengusulkan kenaikan pagu anggarannya. Karena makin lama makin, akan datang sesuai dengan semua permintaan Fraksi agar stanting lebih kecil lagi tingkat angkanya. Ini kewajiban bukan hanya Pemerintah tapi kewajiban kita sebagai Wakil Rakyat.

Untuk itu silakan Sekjen diatur nanti Dirjen mana yang akan bicara.

Terima kasih.

SEKJEN KKP (Ir. R. NILANTO PERBOWO, M.Sc.):

Baik.

Terima kasih Bapak Ketua.

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamuallaikum Warahamtullahi Wabarakaatuh.*
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namó Budhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Dan yang saya banggakan kawan-kawan para Dirjen Perikanan Tangkap,
Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan serta Pejabat Eselon II lingkup Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha
Esa yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.
Sehingga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan
untuk dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan
Komisi IV DPR RI untuk membahas pendalaman Rencana Kerja Anggaran
Tahun 2020 dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal,
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan untuk Tahun 2020.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Ibu/Bapak para Anggota Komisi IV DPR RI
yang kami hormati,

Diawal setelah pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju Bapak
Presiden telah memberikan arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan
untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan pelaku usaha lainnya
sehingga tercipta iklim usaha di sektor kelautan dan perikanan yang kondusif
serta arahan kedua Beliau agar mengoptimalkan dan memperkuat perikanan
budidaya yang kita ketahui bersama potensinya sangat luar biasa.

Terkait penguatan perikanan budidaya sebagaimana arahan Bapak
Presiden dalam Rapat Terbatas dan Sidang Kabinet antara lain membangun
model cluster budidaya untuk udang, lobster, rumput laut, sidap dan patin.
Membangun produksi benih dan induk air tawar, membangun model
percontohan budidaya lobster di unit pelaksana teknis. Untuk itu KKP
mengusulkan pergeseran pagu antar program dalam APBN KKP Tahun
Anggaran 2020 sebesar 115,7 Miliar. Yang nanti akan dijelaskan secara rinci
oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Usulan pergeseran pagu antar program dalam APBN KKP Tahun 2020 bersumber dari pertama, optimalisasi anggaran internal di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar 16 Miliar. Yang kedua, pergeseran dari Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 99,7 Miliar yang terdiri dari:

1. Dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 26,7 Miliar. Yang kami peroleh dari sisa lelang pengadaan kapal pengawasan tipe C sebanyak 2 unit, dan pengurangan biaya operasional kapal pengawas yang sudah tidak layak untuk dioperasikan sebanyak 6 unit.
2. Berasal dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar 3 Miliar, diperoleh dari penundaan pembangunan gudang garam di Cirebon dikarenakan belum diperoleh status lahan clean and clear dari Pemerintah Daerah setempat.
3. Dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar 50 Miliar. Diperoleh dari belanja pegawai penyuluh perikanan PNS dikarenakan terdapat yang dilakukan dari Pusat ke Pemerintah Daerah.
4. Dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing sebesar 20 Miliar diperoleh dari gudang beku sebanyak 4 unit.

Dengan demikian Ibu/Bapak sekalian yang kami hormati,

Usulan perubahan pagu Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Pagu Direktorat Perikanan Tangkap menjadi sebesar 702,46 Miliar.
2. Pagu Dirjen Perikanan Budidaya bertambah sebesar 99,7 Miliar. Dari semula 739,57 Miliar menjadi 839,27 Miliar.
3. Pagu Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing berkurang sebesar 20 Miliar. Dari semula 366,017 Miliar menjadi 346,017 Miliar.
4. Pagu Dirjen Penataan Ruang Laut berkurang sebesar 3 Miliar. Dari semula 507,85 Miliar menjadi 504,85 Miliar.
5. Pagu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkurang sebesar 26,7 Miliar. Dari semula 1 Triliun 62 Miliar menjadi 1 Triliun 35 Miliar.
6. Pagu BLSDM KP berkurang sebesar 50 Miliar. Dari semula 1 Triliun 868 Miliar menjadi 1 Triliun 818 Miliar.
7. Pagu BKIPM, pagu Sekretariat Jenderal serta pagu Inspektorat Jenderal tetap. Masing-masing sebesar 600,075 Miliar. Sekretariat Jenderal 515,623 Miliar, pagu Irjen sebesar 85,267 Miliar.

Selanjutnya sesuai dengan agenda Rapat Dengar Pendapat hari ini perkenalkanlah kami menjelaskan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis KKP lainnya pada Tahun Anggaran 2020. Dan selanjutnya penjelasan dan pendalaman program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan akan disampaikan oleh masing-masing Direktur Jenderal.

Sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis KKP lainnya Tahun 2020 antara lain adalah indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara KKP mencapai nilai 72. Presentasi unit kerja yang menerapkan

sistem manajemen pengetahuan yang terstandar mencapai 82%. Nilai kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi KKP mencapai nilai 85 atau dengan kategori A. Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah KKP mencapai nilai 85 atau peringkat A. Level matoritas sistem pengendalian internal pada level 3. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KKP mencapai nilai 88 atau berkategori baik. Opini atas laporan keuangan KKP dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Presentasi dokumen yang diterima dan ditindaklanjuti dalam kerangka kerjasama sebesar 95%. Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP kurang dari 5%, dan indeks efektifitas kebijakan Pemerintah dengan nilai 8.

Pagu alokasi anggaran program dukungan manajemen dan program teknis KKP lainnya pada Tahun Anggaran berjalan saat ini sebesar 515,62 Miliar diperuntukan antara lain untuk :

1. Penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP sebesar 15,53 Miliar. Pengelolaan sumber daya manusia aparatur sebesar 14,80 Miliar. Pengelolaan keuangan sebesar 20,99 Miliar. Pengelolaan perencanaan, penganggaran, kinerja dan kerjasama antar lembaga sebesar 48,27 Miliar. Pengelolaan administrasi dan pengadaan barang dan jasa sebesar 250,79 Miliar. Pengelolaan hubungan masyarakat dan kerjasama luar negeri sebesar 40,31 Miliar. Serta pengelolaan data statistik dan informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 53,98 Miliar. Dan pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan sebesar 70,9 Miliar.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya kami mengusulkan pergeseran anggaran pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kementerian Kelautan sebesar 11,1 Miliar antara lain digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga pegawai sebesar 5,2 Miliar, pembangunan cafetaria sebesar 2 Miliar, rehabilitasi nyusrum sebesar 1,9 Miliar, pembangunan ruang kontrol terpadu sebesar 1 Miliar dan untuk perluasan poliklinik Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 1 Miliar.

Usulan perubahan komposisi pagu anggaran Sekretariat Jenderal antara lain:

1. Dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP sebesar 952,21 Juta sehingga alokasi anggaran menjadi 14,58 Miliar.
2. Pengurangan anggaran pada kegiatan pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 761,09 Juta sehingga alokasi anggaran 14,08 Miliar.
3. Pengurangan anggaran pada kegiatan pengelolaan keuangan sebesar 916,01 Juta sehingga alokasi anggaran menjadi 20,07 Miliar.

4. Pengurangan anggaran pada kegiatan pengelolaan perencanaan, penganggaran, kinerja dan kerjasama antar lembaga sebesar 1,64 Miliar sehingga alokasi anggaran menjadi 46,63 Miliar.
5. Optimalisasi anggaran pada kegiatan pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa sebesar 2,56 Miliar, dan penambahan anggaran sebesar 8,54 Miliar dari pergeseran pagu anggaran lingkup Sekretariat Jenderal sehingga alokasi anggaran menjadi 259,34 Miliar.
6. Pengurangan anggaran pada kegiatan pengelolaan hubungan masyarakat dan kerjasama luar negeri sebesar 1,79 Miliar sehingga alokasi anggaran 38,51 Miliar.
7. Pengurangan anggaran pada pengelolaan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan sebesar 849,51 Juta sehingga alokasi anggaran menjadi 53,13 Miliar.
8. Pengurangan anggaran pada kegiatan pengelolaan model usaha kelautan dan perikanan sebesar 1,63 Miliar. Sehingga alokasi anggaran menjadi 69,27 Miliar.

Ketua, Wakil Ketua, dan Ibu/Bapak para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Demikian penjelasan perubahan komposisi pagu anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020 yang dapat kami sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat kali ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI yang sangat besar pada KKP. Selanjutnya kami mohon arahan dan persetujuan terhadap perubahan komposisi pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan secara menyeluruh serta pagu anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020.

Terima kasih.

*Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Budhaya,
Salam kebajikan.*

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Hallo.
Yang lagi ngobrol halo.

Senyum semuanya, tidak ada ketegangan ya. Yang tegang nanti malam saja. Rapatnya harus selesai sore-sore jangan terlalu malam. Karena tiap hari pulang malam, lelah.

Pak Dirjen ada penjelasan dari ... (suara tidak jelas).

Cukup.

Langsung pertanyaan, langsung ujian. Pulang dari sini jadi Doktor.

Baik, mukanya hari ini muka. Komisi IV lagi ceria Pak. Senyum karena ada hujan. Kalau hujan itu rapat dengan KKP cermin dari keberhasilan, kemakmuran karena perairan.

Dimulai dari Bu Riezky. Tidak ada. Rapat.

ANGGOTA KOMISI VI DPR RI:

Interupsi Pimpinan.

Itu yang tadi dijelasin baru dari Setjennya, dari Dirjen ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Ya saya tadi juga mempersilakan, apakah perlu para Dirjen memberikan penjelasan. Dari Dirjennya mengatakan cukup. Kita tanya, perlu. Atau bertanya dulu nanti dijawab deh. Iya kan. menjelaskan dengan tidak dijelaskan pertanyaannya pasti sudah ada di kepalanya. Diantaranya adalah kalau bikin program gemar makan ikan. Makan ikan itu yang sehat itu seminggu 3 kali. Sehingga nanti tidak setahun sekali. Gemar makan ikannya stanting, tidak akan selesai dengan makan ikan setahun sekali. Jadi makan ikannya harus seminggu 3 kali.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

(suara tidak jelas).

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Oh iya betul Bu. Iya kan saya tahu pasti itu yang diusulin.

Dari Bu Endang dulu biar cepat sehat. Bajunya sudah hampir sama dengan baju KKP.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.S.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Sekjen, dan Pak Dirjen yang saya banggakan, dan Teman-teman Anggota DPR RI Komisi IV yang tercinta.

Kebetulan Dapil saya ini di Kota Bogor dan Cianjur. Nah Kota Bogor ini terkenal dengan ekspor ikan hiasnya Pak. Yang makin lama makin menurun. Kebetulan dulu saya sempat menjadi Direktur Agriculture manajemen yang membangun Balitkanwar. Jadi tidak malah naik Pak. 2019 mulai turun. Kenapa? Karena ekspor ikan hias tidak sesuai dengan permintaan yang dari Luar Negeri. Sering terjadi miscommunication.

Yang kedua, yang diuntungkan adalah para pengeksportnya Pak. Teman-teman yang di budidayanya dirugikan karena tidak ada komunikasi baik antara eksportir dan yang membudidayakan. Nah untuk itu mohon ada forum komunikasi antara eksportir dan pembudidaya.

Kemudian yang kedua, teman-teman pembudidaya ini selalu mengalami kesulitan dalam manajemennya Pak. Nah mungkin perlu ada karena di KKP ini kan ada program koperasi dan BLU. Nah mohon ada training-training untuk laporan keuangannya di para pembudidaya. Karena mereka ingin ada transparansi antara pengeksport dan pelaku budidaya.

Nah kemudian yang kedua Cianjur Pak. Cianjur ini kita punya waduk Cirata. Tapi akhir-akhir ini banyak sekali pencemaran karena selain irigasinya yang 420.000 hektar merupakan irigasi lahan pertanian. Nah ternyata Pak terdapat 12.000 keramba jaring apung. Oh lebih tuh. Nah jadi kita harapkan harus ada penertiban. Nah permasalahannya mungkin juga. Kebetulan ada Pak Dedi. Sungai Citarum sudah tercemar. Nah mungkin harus ada kerjasama dengan LHK. Nah analisisnya untuk memulihkan kondisi air dengan cara mengurangi keramba jaring apung, mohon ditertibkan. Karena Waduk Cirata ini dari 32.000 unit sebetulnya maksimal kalau kita hitung hanya 7204 unit.

Nah kemudian juga Saguling dan Waduk Jatiluhur ini Pak. Jadi mengalirnya kesana. Jadi mohon ada penertiban jaring apung ini untuk menurunkan produksi dan membersihkan air irigasinya Pak.

Yang kedua, adanya keramba jaring apung. Sebetulnya kita tadi ingin meningkatkan produksi ikan air tawar yang kita harapkan bisa mengurangi stanting tadi. Tapi karena adanya pencemaran, jadi kami juga agak ragu untuk menjelaskan ke masyarakat setempat. Nah untuk itu mohon dari Kementerian yaitu dari Badan Riset, Badan Litbang Perikanan. Saya banyak kenalan disitu Pak dan banyak ahli-ahlinya. Kalau dulu kan tidak pernah dibiayai. Mohon diarahkan kesana Pak. Karena banyak sekali ahli-ahli yang kita sekolahkan sampai Doktor tapi *idle* Pak, tidak dimanfaatkan. Mohon maaf ini Pak. Ini banyak sekali teman-teman saya peneliti yang mengeluh. Jadi mohon riset sosial ekonominya juga diperhatikan.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Terima kasih.

Kita sepakati ya. Kalau sudah 3 menit saya stop.

Setuju tidak?

(RAPAT: SETUJU)

Nah kalau Ibu sudah berbicara masalah keramba memang disitu problemnya banyak hari ini Bu. Makan ikan itu belum tentu sehat. Ini yang problem hari ini ya. Ini saya sudah punya beberapa riset termasuk di 2 tempat ini tempat saya juga, Jatiluhur. Pembersihan disitu dulu sudah dilakukan. Saya waktu menjabat dilakukan. Tetapi resikonya sangat tinggi, perlawanannya sangat kuat karena kehidupan. Tetapi jujur-jujuran bahwa itu tidak dikuasai rakyat. Itu dikuasai bandar. Ada 1 orang menguasai 1000 lapak, 200 lapak, 4000 lapak. Dan orang situ hanya jadi tukang, tukang mikul. Nah ini problem ya. Tetap saja konglomerasi yang menguasai.

Yang berikutnya kita dengarkan sesuatu yang sangat baik bagi kehidupan kita sebuah Firman dari Pak Subagja.

Terima kasih.

Pak Soebagyo.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati, dan
Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Sekjen bersama seluruh Dirjen yang hadir beserta seluruh jajarannya.

Saya mungkin singkat, padat Pak. pertama, saya memberikan apresiasi penjelasan Pak Dirjen atas kebijakan optimalisasi terhadap program budidaya. Karena memang budidaya ini betul-betul sangat menyentuh, dan ini bisa menggerakkan perekonomian rakyat ditingkat desa. Namun tentunya ini pembinaan Pak yang harus berkelanjutan. Karena banyak juga yang setelah mereka itu berhasil kemudian mereka itu bukan untuk kepentingan masyarakat disekitarnya tapi hanya untuk kepentingan individual. Sehingga yang menikmati hanya kelompok-kelompoknya saja. Sedangkan masyarakat lainnya itu tidak ikut menikmati. Nah ini mohon nanti, apakah pedumnya atau aturannya yang mungkin diberikan pemahaman bahwa para penerima program itu adalah merupakan sarana ... tapi asas manfaatnya. Itu adalah untuk kepentingan masyarakat disekitarnya. Jadi bukan milik orang per orang.

Nah kemudian mengenai masalah yang terkait dengan lobster tadi yang ditingkatkan. Saya justru malah menekankan kepada Pemerintah agar semua rekayasa manusia terkait lobster yang bertelur untuk diekspor selama itu adalah rekayasa budidaya maka Pemerintah harus bikin regulasi memperkuat. Harus berikan kemudahan-kemudahan dan didukung, kecuali kalau lobster

bertelur yang tangkapan langsung diekspor itu yang dilarang. Tapi kalau rekayasa harus regulasi dibuat. Karena itulah nilai ekonomi ada disitu. Nah ini kemarin kan kebalik-balik Bu Susi itu. Semuanya dilarang. Akhirnya tidak ada kreatifitas masyarakat. Nah kalau ini bagaimana masyarakat mau mengembangkan ilmu-ilmu kan masyarakat itu sangat luar biasa. Ini mohon juga diperkuat dalam regulasinya. Karena nilai ekonomi dan ini bisa menggerakkan ekonomi pedesaan. Ini dua.

... kapal Pak. Pak Zul, ini masih banyak keluh kesah Pak. Di masalah perkapalan ini ijin-ijin yang masih prosesnya terlampau lama. Nah ini mohonlah agar diperhatikan betul. Karena ini Pak Agus tahu itu. Nasibnya kapal cantrang Pak terombang-ambing nih Pak. Ketika itu didorong Pemerintah untuk move on ke ... cantrang, terus kemudian diarahkan lepas pantai di Papua sana, ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi konsep ketika itu. Sekarang akhirnya banyak yang terlantar. Kemudian setelah mereka move on balik lagi cantrang dihidupkan kembali. Jadi sekarang kayak kebingungan. Yang saya move on-kan ke ... cantrang belum balik modal, ini dah cantrang dibalikan lagi. Mohon ini konsistensi dalam bikin regulasi Pak mohon betul-betul memperhatikan mereka-meraka karena.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Waktunya habis Pak.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Iya.

Satu lagi Pak mengenai kapal ... Pak, kapal angkut. Mohon kapal angkut Pak itu GT-nya juga jangan dibatasi. Minimal 200 keataslah, ya 200 minimal. Terus kapal asing Pak. Mohon juga kapal-kapal eks asing kalau dibuka ijinnya lagi mohon juga dibatasi dan kemudian juga kapal buatan Indonesia yang belum keluar ijinnya Pak mohon juga dikeluarkan ijinnya. Jadi ada keseimbangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Terima kasih.

Makan ikan laut itu apalagi kalau higienis enak sekali, bahkan bisa nambah berkali-kali. Nah kata orang sunda yang makan nambah berkali-kali sebutnya mindo. Jadi kalau makan berkali-kali 1 piring itu namanya mindo. Nah Pak Mindo ini mindo jadi Anggota DPR sampai 5 kali. Jadi sekarang kita dengarkan Mindo Sianipar.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Terima kasih Pak Ketua.

Saudara-Saudara Eselon I,

Satu periode jamannya Ibu Susi saya tidak bicara ini. 2 periode sebelumnya berturut-turut saya bicara dan tidak ada hasilnya, padahal dibutuhkan rakyat. Ini saya kasih waktu 1 tahun untuk Saudara-Saudara. Satu, coba diseminasikan mengembangbiakan cacing sutra supaya bisa dikerjakan rakyat. Tidak ada ikan air tawar yang bisa optimal tumbuh tanpa cacing sutra pada umur tertentu. Yang kedua, carikan ahli dan diseminasikan pembiakan pemijahan belut barat. Belut itu konsumsi yang ... memang. Jangan dianggap rendahan itu. Ekonominya bagus itu, belut. Ada seorang Ibu di Sukabumi sana ... 15 tahun lalu dia ekspor jamu kepala belut ke Timur Tengah. Itu belut. Saya minta 1 tahun ini. Kasih waktu. Kalau tidak sama yang lalu-lalulah. Doktor ... tidak jelas bagi saya. Jangan sampai politisi yang menemukan itu. Yang ketiga, sudah masuk disitu, sidat. Nah sidat ini Saudara-Saudara ini bisnisnya supaya tidak dikuasai pengusaha besar semua, biar dia di akhir saja untuk mengekspor maka pembudidayaannya melakukan seperti pembudidayaan ikan gurame. Ikan gurame itu tidak ada satu pembudidaya, mulai dari pemijahan sampai menjual konsumsi itu tidak ada. Dagang budidaya ikan gurame ini minimum 4 kali sampai 5 kali.. Mulai dari jual telurnya di ijuk, ya dtetaskan umur 2 minggu jual dalam bentuk liter. 1-2 berikutnya jual dalam bentuk ekor, naik ke ukuran 4 cm jual, pembeli itu terakhir untuk konsumsi. Sidat kalau kita lakukan seperti itu, itu akan mensejahterakan rakyat wabil khusus bukan hanya masyarakat pesisir. Tidak hanya bisa sebesar Jagfa Confeed, tidak. Kalau hanya sebesar Jagfa Confeed gagal kalian. Gagal kalian, tidak ada gunanya jadi Doktorlah kalau itu tidak bisa diselesaikan. Itu yang keempat.

Yang keempat, ada pemahaman yang keliru baik dibanyak Anggota DPR. Yang saya kecewa itu juga di Kementerian Kelautan Perikanan. Kalau sudah pelihara lele dikolam bulat itu namanya bioflog. Jadi mulai sekarang janganlah sebutkan kolam bulat itu bioflog. Tetapi bio yang ngeflog. Iya karena itu ada bio yang ngeflog, populasi. Jadi bukan karena bulat namanya bioflog, keliru itu. Tempat ... bisa bioflog. Biar paham apa pengertiannya bio yang ngeflog itu. Diseminasikanlah teknologinya, bagaimana membuat bio yang ngeflog itu.

Dua terakhir, nah kira-kira sampai 4 tahun lalu saya pernah makan di restoran di Ambon di restoran 2 ikan. Nah ini ada Beliau mantan Bupati. Itu makan lalat rumput laut, enak sekali. Jenis apa itu? Rumput laut makan restoran mentah luar biasa enakya. Coba itu dikembangkan. Tadi kan bicara rumput laut tadi itu.

Nah yang terakhir buat tangkap ini ya. Coba mulai digantilah kapalnya sebagian dari fiber glass menjadi polyetilate.

Saudara-Saudara,

Secara kimiawi fiber glass itu polimerisasinya tidak selesai. Dia berjalan terus. Ada matahari. Jadi tanpa benturan dengan kapal lain pun dia akan retak tiba waktunya. Itu pengaruh UV. Polimerisasinya tidak selesai. Nah itu bisa digantikan polyetilate.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Setelah makan enak, tidur enak menjabat berkali-kali maka hidup harus berbagi. Menebarkan salam sampai salamnya ketingkat tinggi dan itu ada di Pak Salim Fakhry.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang saya hormati Pak Dedy, Pak Budi, Pak Azam, Pak Sekjen dan jajaran Pak Dirjen,
Pak Sudin karena kurang disiplin tidak kita bilang. Jangan dilapor Pak, nanti kurang.

Pak Sekjen,

Tadi pengantar Pak Ketua kalau saya tidak salah anggaran di KKP sangat minim Pak. Kita sependapat Pak. Dan hari ini Pak Budi, Pak Darori rapatnya tenang Pak. Ketika Pak ... ketika memimpin rapat kurang nyaman Pak. Cuma selesai semua.

Begini Pak Sekjen, ini masukan Pak Pimpinan. Anggaran yang sebegini mungkin Pak Eddy pun dulu tidak tahu bahwa Beliau menjadi Menteri KKP. Dari anggaran sekian belas Miliar turun jadi sekian. Ini kan kita merasa juga tidak fare Pak Sekjen. Saya bukan bela Pak karena saya dari Partai Golkar membela Pak Menteri tidak. Partai Golkar ini pun yang mendukung Pemerintah Pak. Ada satu solusi Pak Pimpinan, kalaulah bisa melalui Pak Sekjen melalui Pimpinan yang saya katakan tadi mungkin tidak resmi. Kami ada beberapa orang di Banggar mewakili Komisi IV Pak Sekjen. Mari kita bertemu. Berkoordinasi antara KKP, bagaimana kalau kita sepakat melalui Komisi IV ini anggaran KKP ini kedepannya atau pun ada peluang di perubahan akan kita tingkatkan. Saya kita setuju semua Pak Sekjen. Sebab Pak Ketua, Pak Sekjen ini ... akan lapor ke Pak Menteri, siapa yang membantu kita bilang Pak Menteri. Berarti saya salah satu masuk.

Hal yang lain saya sederhana saja Pak Ketua. Masalah Bansos Pak. Melalui Pak Sekjen dan Pak Dirjennya. Bansos tadi sudah dijelaskan Pimpinan sama kami, bukan tujuan kami untuk pribadi Komisi IV karena kita bermitra. Kami membantu Kementerian KKP untuk menyalurkan ke masyarakat. Cuma satu harapan kami Pak Sekjen, kemana bantuan ke daerah Dapil kami tolong dikoordinasikan dengan Anggota Dapil. Kami disini contoh Aceh ada 3. Saya, Pak Muslim, Pak Khalid. Dapilnya 2. Kalau Pak Sekjen ada bantu alat umpama ke Aceh Besar Dapil saya. Apa salahnya saya dilibatkan Pak Sekjen. Kami bukan mengatur maksudnya dari Pak Sekjen, dari Dirjen supaya kemitraan

antara Komisi IV dan KKP itu bisa terjalin baik. Ini Bapak masuk-masuk saja ke. Saya tidak mau ke Provinsi mana, saya tidak mau ke Jawa Barat disitu ada Pak Ketua. Saya khusus di Aceh contoh. Masukan ke Kabupaten A. Kami tidak tahu apa fungsi kami. Kami bukan mengatur, bukan menyetel, bukan mempengaruhi dari Kementerian KKP. Harapan kami itu saja Cuma. Tadi bioflog menurut Pak Sudin tadi diperbesar, ini dikurangi. Kami ini rapat ini kita tinggal menjalani ini Pak Sekjen. Coba kami tawarkan Pak Sekjen, kami ada berapa disini di Banggar mari kita koordinasi. Disitu nanti Pak Sekjen buktikan Cuma atas perintah Pimpinan. Kami akan all out membantu Kementerian KKP. Pak Menterinya nih bekas Ketua kami disini Pak, sampaikan salam saya. Bilang Pak Salim Fakhry kasih puji-puji KKP tadi bilang Pak. Partainya Golkar Pak, jangan salah Pak. Bukan Gerindra. Jadinya kita sepakat saja Pak Ketua. Rapat ini pun dingin saya tengok. Kalau ... Cuma ada kekurangan satu adik saya tidak hadir disini. Saya takut Pimpinan agak apa kan.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Sudah habis waktunya.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Siap.

Terima kasih itu saja.

Terakhir Pak Ketua, tolong Pak Sekjen, Pak Dirjen kalau Pak Slamet ini sudah sering ke kampung saya Pak dan sudah bantuan-bantuan ke sana. Kami ini 54 orang. 54 jadi satu Pak Ketua. Satu untuk 54. Jangan lagi Pak macam dulu Pak. Saya tidak mau minta tidak dapat. Ini banyak kawan-kawan yang baru. Ada Selamat Sehat, Selamat Bebek ini yang baru-baru nanti tidak paham Pak. Kalau kami oke Pak sudah mungkin kata Pak Mindo sudah senior. Ada senior yang dapat, yang baru ini tidak dapat, tidak juga Pak. Kami 54 jadi satu, satu untuk 54. Cuma kalau Pimpinan kami juga paham Pak, namanya Pimpinan. Duduknya pun dengan kami berbeda Pak.

Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Terima kasih.

Ini saya baru lihat Pak Salim Fakhry ini baik banget hari ini. Ini kalau ditulis bisa jadi tulisan-tulisan indah dalam buku-buku di jurnal internasional. Dan penulis kita yang terbaik dulu itu adalah Pak Rosihan Anwar. Dan kalau disini kita punya Johan Rosihan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Luar biasa Pak Ketua ini.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Pimpinan yang saya hormati beserta Anggota,
Pak Sekjen dan para Dirjen serta jajaran dari Kementerian KKP.

Yang pertama kita menyambung Pak Salim Fakhry memang kita ini belum adil ya memandang alam ini. Kita belum memandang laut itu sebagai ladang buat penghasilan masyarakat kita. Tidak seperti kita memandang sawah. Karenanya kalau anggaran Menteri Pertanian itu 23 Triliun tidak sebanding dengan Kelautan yang Cuma 6,4 Triliun ini. Padahal sawah itu dari tahun ke tahun juga berkurang karena pertumbuhan penduduk. Laut ya kalau kita jaga ya segitu-gitu saja laut itu dengan segala potensinya yang ada. Karenanya sangat mendukung sekali jika kemudian Komisi IV serius untuk memperjuangkan anggaran penambahan buat KKP ini.

Pak Ketua, Pak Dirjen yang saya hormati,

Kemarin waktu saya reses itu saya tidak terlalu banyak bicara, saya menyampaikan hasilnya saja Pak Ketua. Pertama, masyarakat pesisir terutama untuk nelayan-nelayan kecil itu butuh ada unit pengisian bahan bakar di Daerah Pesisir. Karena mereka harus cari ke daerah darat begitu yang bersamaan dengan truk segala macam untuk mengambil bahan bakar. Dan mereka biasanya tidak mendapat jatah untuk itu karena mereka tidak bisa membawa perahunya ke laut, mereka pakai dirigen. Nah beli dirigen itu dia tentu berbeda dengan kalau orang. Nanti dia belakang begitu. Karenanya dibutuhkan berapa unit. Jadi sepanjang teluk saleh itu Pak tidak ada satu pun pom bensin khusus nelayan. Jadi kalau ini bisa dicantumkan bagus menurut saya.

Yang kedua Pak, kita butuh alat peningkatan kualitas garam. Alat cuci garam. Saya kemarin itu mendapat aspirasi itu di Labuan Bontong Pak Kecamatan Empang Sumbawa. Demikian juga di Talabiu Bima. Mereka juga minta supaya ada rehab lokasi tambaknya itu Pak. misalnya untuk irigasinya, jalan produksinya, segala macam karena dari 300.000 per ton garam itu. Itu 100.000 nya untuk ongkos angkut. Jadi sisa 200.000. Jadi dibutuhkan perbaikan jalan produksi ditambah-tambah rakyat itu.

Yang berikutnya, saya mendengar tadi ada program perhutanan sosial di Kementerian. Nah kebetulan kami punya satu kawasan bagus disitu kawasan Teluk Saleh. Itu basisnya adalah hiu, paus dan tracking mangroof Pak. Nah kalau bisa ini juga dimasukkan kedalam program kehutanan sosial itu. Agar apa, karena dikawasan itu juga banyak bom-bom ikan supaya ini bisa kita mengkonversi kerusakan lingkungan itu dengan program perhutanan sosial ini dengan basis hiu, paus dan tracking mangroof.

Yang berikutnya Pak tentang bantuan kapal patroli. Saya terakhir kemarin reses kunjungan Dapil itu di Dusun Tero Desa Jotang Kecamatan Empang. Itu Kepala Desanya mengadu ke saya, ini sudah 3 tahun mereka minta perahu patroli ini Pak karena ketika mereka ke polisi, dia bilang Pak Kades persoalan kita sama Pak. Kita tonton saja dari darat orang-orang yang mengebom ikan itu. Kita tonton saja dari darat orang-orang yang merusak lingkungan itu karena kita sama-sama tidak punya kapal untuk patroli. Di

Sumbawa Pak di Bagian Selatan di Desa Jotang Beru namanya Kecamatan Empang. Nah jadi itu mungkin beberapa hal Pak tentang rehabilitasi kawasan tambak. Garam juga sudah saya sampaikan tadi soal irigasi maupun jalan produksi.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Terima kasih sudah disampaikan. Dan tadi yang Pak Salim Fakhry nanti kita tindaklanjuti segera, karena kita tidak mungkin anggaran di Kementerian dengan kisaran yang hanya terbatas. Dulunya asalnya 13 ya. Pernah 13. Dan memang Bu Susi itu rajin membakar kapal, kurang rajin belanja. Nah sekarang kita tinggalkan tinggalkan bakar kapalnya terus, belanjanya tingkatkan.

Bagaimana Pak?

F-PKS (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Jadi kalau beralasan anggarannya kecil akan langsung miskin terus tuh KKP.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Oh iya makanya kita tingkatin.

F-PKS (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Jangan begitu cara pembahasannya.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Bagaimana?

F-PKS (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Tetap saja kecil berbagi, besar berbagi, tidak ada alasan ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Eenggak saya tidak alasan itu. Saya hanya alasan kita dukungan pandangan Pak Salim Fakhry untuk meningkatkan anggaran di kelautan. Yang ngurus bagi Pak.

F-PKS (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Soal bagi-bagi tetap.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Bagi-bagi mah yang sekarang harus tetap.

F-PKS (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Ya jadi tidak ada alasan bahwa oh ini anggaran kecil jadi begini.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Kesana lihatnya jangan ke saya kalau urusan ngebagi. Saya kan bukan orang yang bagi.

F-PKS (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Karena Ketua yang buat statement jadi saya interupsi untuk Ketua. Tapi kalau Pak Sekjen yang buat statement, saya interupsi Pak Sekjen.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Jadi ngebelain Pak Sekjen sekarang.

Ya selanjutnya sama yang lagi bahagia dalam 2 hari ini. Mukanya cerah, katanya pulang dari Jawa Tengah, kekayaannya bertambah. Sekarang Mbak Luluk. Mbak Luluk mau beli berlian, permata.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Sekjen, dan Dirjen semuanya.

Saya mungkin merespon statement rekan yang terdahulu yang kira-kira akan memberikan dukungan untuk Kementerian KKP ini dalam bahasa yang lain. Mudah-mudahan Dosen terdahulu segera dimaafkan dan kita bekerja memang untuk rakyat, untuk nelayan kita menjadi lebih baik. Dan anggaran ini memang menurut saya sangat jauh dari cukup mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi. Akan tetapi Pak Sekjen yang terhormat, saya juga mengamati mempelajari beberapa materi RDP yang disajikan kali ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, antara lain pemilihan lokasi seperti di Jawa Tengah itu pertimbangannya apa sih untuk prioritas Tahun Anggaran di 2020. Karena saya mencari-cari Kabupaten saya kok tidak ada. Jadi, ya kalau laut jelas memang tidak ada tapi di Wonogiri itu sebenarnya ada. Justru disana itu persoalannya karena memang tidak ada intervensi serius terutama menurut Kepala Daerah itu butuh intervensi dari Pemerintah Pusat karena kondisinya yang memang cukup sulit sehingga kondisi nelayan yang disitu dan kemudian juga daerah pantai yang memang kecil dan kondisinya agak curam. Akhirnya yang miskin makin termiskinkan karena memang dia agak terisolasi. Tetapi kan disana ada warga, ada sekian Kecamatan yang terhubung dengan pantai yang

ada di Wonogiri. Sebenarnya itu bagus Pak, mulai itu mau dikembangkan wisata atau apa dan sebagainya. Ternyata itu tidak ada dan tidak dilirik juga. Tapi kalau menurut Pemerintah Daerah memang ini butuh anggaran yang relatif cukup. Kayak pantai Nampu, Sembukan, dan lain itu adanya di Wonogiri. Karena itu masuk jalur di Pantai Selatan. Pasti bagus sebenarnya.

Kemudian yang kedua berbicara tentang perikanan pasti juga bukan hanya laut tetapi juga yang darat. Nah untuk yang darat ini juga saya melihat kok masih mengalami diskriminasi ya. Padahal kalau sumbangan perikanan budidaya sebenarnya kan relatif cukup besar. Tetapi untuk prioritas anggaran ini yang budidaya yang darat ini seperti apa Pak Sekjen. Saya memang agak fokus ke Dapil saya ya. Bagaimana potensi waduk yang sangat besar ini belum dilihat sebagai satu kerjaan yang itu bisa dilakukan sesuatu. Waduk Gedong Ombo itu bukan hanya di Grobogan Pak. Itu bisa meliputi 4 Kabupaten. Nah sebagian besarnya sebenarnya itu justru adanya di Sragen. Kayak yang tahun kemarin saja itu ada persoalan dengan Waduk Gedong Ombo karena ada perubahan suhu yang mana kemudian ratusan ton itu kemudian mati dan pasti ratusan juta. Nah mereka ini juga sedang trauma. Ketika ada perubahan musim seperti ini khawatir juga akan terjadi lagi dan apa yang kemudian disiapkan baik itu risetnya atau dukungan teknis non teknis dari Kementerian untuk bisaantisipasi apabila terjadi hal serupa. Karena ini katanya tahunan. Nah kalau tahunan berarti kan seharusnya situasi seperti ini bisa dicegah. Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan.

Yang ketiga, karena memang tidak jadi prioritas program mungkin bisa dikoreksi Bapak jadi tolong itu bisa dimasukkan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak juga nelayan-nelayan kita disana mereka tentu juga butuh alat tangkap jaring apung misalnya ya. Kemudian juga alat pengolahan Pak. Itu yang paling penting. Saya selalu bilang ketika tidak punya penyimpanan ikan maka ikan ini tidak akan pernah bisa bertahan lama tetapi keluarga-keluarga nelayan ini kan harus tetap diselamatkan. Mereka mau simpan dimana. Nah kalau kemudian kita bisa memberdayakan keluarga-keluarga ini dengan apakah itu pelatihan, atautkah kemudian ada sarana-prasarana lain misalnya untuk pengolahan ikan-ikan ini menjadi komoditas turunannya maka ini akan bisa menjaga kelangsungan hidup mereka. Begitu pun juga di Wonogiri. Yang mana mereka punya Waduk Gajah Mungkur. Airnya sudah tidak dinikmati oleh warga Wonogiri karena mengairi daerah Solo, Sukoharjo dan sekitarnya. Tapi masa kemudian dari ikannya pun juga mereka tidak dapat manfaat itu.

Nah kemudian bagaimana menggerakkan komunitas perempuan dan orang-orang muda untuk bisa mencintai tanah airnya dan ikannya itu kalau tidak kemudian kita berikan semacam edukasi tapi sekaligus ketrampilan, budidaya perikanan. Itu bisa mengantisipasi kelangkaan kita. Kalau di pertanian juga kita juga omongkan pertanian milenial. Nah ini nelayan juga begitu. Kalau minat terhadap budidaya itu banyak.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Waktunya sudah habis Bu.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Ya setengah menit Bapak.

Cuma saya protesnya karena ini tidak ada. Jadi tolong benar ini agar bisa dikoreksi. Nanti kalau saya pulang ke Dapil susah karena tidak ada ini Kabupaten Karanganyar, Wonogiri dan juga Sragen padahal itu angin yang besar di perikanan daratnya.

Kayaknya itu saja Pak Dedi ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Sekarang kita berkunjung ke Pak Edward.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan beserta Anggota Komisi IV yang saya banggakan.

Bapak Dirjen beserta jajaran,

Saya disini Pak. Edward itu hanya satu. Edward Tanur, Dapilnya NTT. Jadi dari namanya saja mungkin Bapak Dirjen sudah bisa tahu orangnya. Jadi begini Bapak Dirjen, saya itu sudah duduk di Komisi IV saya bingung. Potensi daerah saya itu sebenarnya sudah ditelusuri oleh Kementerian Kelautan Perikanan atau belum. Karena di Daerah saya itu banyak potensi Cuma karena ini penelusuran atau data-data itu belum masuk ke KKP. Jadi kami prihatin sekali. Terlebih Bapak hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah ini sangat error. Jadi saya sendiri kalau turun Dapil Pak, saya minta data dari Dinas Perikanan atau Pertanian sulitnya setengah mati. Jadi tidak ada sinkron. Dianggap Anggota DPR ini kerja untuk dia punya diri padahal dia tidak tahu asas demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kita mau menyalahkan dia ya namanya Pimpinan wilayah. Jadi kami tidak sinkron. Dari awal sejak saya menyampaikan dalam RDP yang pertama, saya sudah sampaikan pendataan mengenai ... tapi orang disana jarang makan ikan. Karena apa, ya kesulitan peralatan itu Pak. Peralatan tidak ada, bangun dermaga, ombak pukul satu kali dermaganya itu terlempar semua rusak. Airnya ada sumber air seperti sumber air tawar itu banyak Cuma tidak dimanfaatkan. Itu sayang Pak. Jadi apakah Dinas KKP ini punya data tentang terlebih Kabupaten Timor Tengah Selatan, itu penting Pak. Potensinya banyak. Ada telaga, telaganya besar di pinggir jalan tapi sampai hari ini tidak dimanfaatkan untuk mungkin pemeliharaan ikan air tawar atau seperti perkampungan para wisata yang kapan hari pernah dibicarakan untuk perkampungan nelayan ya. Itu yang saya bingung sampai sekarang ini. Saya ingin tanyakan saja, apakah ada program untuk NTT terlebihnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Itu potensinya

cukup banyak. Apabila ada Pak saya minta tolong berikan untuk saya. Sehingga pada waktu saya tanggal 1-2 Maret Reses saya sampaikan. Walaupun kali ini anggarannya KKP-nya kecil tidak apa walaupun belum di flogkan tidak apa. Ini sekedar informasi. Sehingga kedepan Bapak Dirjen bersama jajarannya dan Kementerian KKP bisa memperhatikan daerah ini. Itu hanya stanting. Tapi dananya tidak turun kesana untuk membuat budidaya ikan air tawar dan lain-lain dan itu hanya mimpi.

Saya kira saya hanya sampaikan itu sebagai bahan informasi dan koreksi untuk Kementerian KKP.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Terima kasih Pak Edward.

Untuk kasus stanting ada 2 hal sebenarnya pendekatan dilakukan. Yang pertama Kementerian Pertanian itu memberikan subsidi atau bantuan beras yang sudah bernutrisi tinggi. Kan sekarang sudah ada produk berasnya. Itu ditempat itu.

Yang kedua, KKP memfollow up terus secara terus menerus untuk memberikan makanan ikan. Kebiasaan kita kan nangani itu satu tempat geser lagi geser lagi. Itu tidak jadi hasilkan apa-apa. Tapi kalau tempatnya disitu terus menerus disitu, kemudian diukur oleh Kementerian Kesehatan pertumbuhannya. Nanti kita secara grafik bisa menjelaskan bahwa dalam tahun ini ada penurunan angka stanting titiknya disini, disini, disini.

Nah selanjutnya kita lanjutkan kita teruskan agar hidup ini terus punya harapan walaupun harapannya itu kadang terjawab kadang tidak. Tetapi kita harus punya kerja keras. Pak Suhardi Duka. Duka tercapai, duka tidak tercapai.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota yang terhormat,

Yang saya hormati Pak Sekjen bersama Pak Dirjen dan seluruh jajarannya,

Sebenarnya potensi perikanan kita besar baik perikanan tangkap, budidaya, ikan ada dilaut, didarat, disungai bahkan disawah ada ikan. Tapi kita berhadapan dengan stanting. Saya kira ini paradok. Olehnya itu dari anggaran perubahan yang Bapak ajukan. Saya memberikan penilaian bahwa perlu fokus untuk peningkatan ekspor. Jangan terlalu banyak improvisasi dengan biaya dukungan administrasi dan manajemen sampai 500 an Miliar. Kemudian saya juga kalau melakukan pendekatan pengamanan terus. Saya kira tidak bisa meningkatkan produktifitas. Katakanlah seperti contoh udang kita, ekspor kita cukup kuat bahkan 5,7% mampu memenuhi kebutuhan ekspor dunia. Hanya saja didalam anggaran ini saya melihat tidak fokus untuk mendorong

peningkatan produktifitas udang. Utamanya udang Indonesia yaitu udang windu. Demikian juga dengan sidat. Kita punya 18 species dan dunia ya kita punya 7 species untuk Indonesia. Saya kira ini juga perlu untuk fokus mendorong karena ini adalah untuk peningkatan ekspor.

Untuk Sulawesi Barat saya memiliki semua. Hanya yang saat ini yang menjadi kebutuhan masyarakat kami di Sulawesi Barat adalah rumput laut. Sepanjang pantai di Sulawesi Barat itu rumput laut. Mereka hidup dari rumput laut. Hanya saja rumput laut ini kalau terus-terus itu yang diambil bibitnya tidak berganti-ganti, itu produksinya turun terus. Olehnya itu perlu ada perubahan atau pergantian bibit rumput laut ini supaya tidak jenuh dengan kondisi yang ada disitu. Dengan demikian saya meminta kepada KKP supaya bantu saya untuk bisa mengubah atau mengganti rumput laut yang lebih, bibit rumput laut yang lebih produktif untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita.

Dan satu lagi di Mamuju yaitu ratusan kapal nelayan itu berada di sungai karena memang aman, karena belum ada pelabuhan nelayan. Dan mereka itu amang disitu. Tapi saat ini muara sungai itu pendangkalan. Dengan demikian mereka butuh pengerukan jika sekiranya ada dari KKP bisa mengeruk muara sungai itu saya kira mereka akan sangat berterima kasih kepada kita. Kita tidak bisa terlalu mengkritisi KKP ini karena memang anggarannya cukup kecil. Tapi kami juga saya ada di Banggar. Saya berjanji akan bisa membantu KKP untuk 2021.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Wa'allaikumsalam.

Walaupun kecil tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar hasilnya tercapai dengan harapan. Kalau sudah berusaha apa pun hasilnya maka kita harus berserah diri. Dan orang yang berserah diri adalah seorang muslim. Seharusnya Pak Muslim.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV, Pak Sekjen beserta jajaran, Pak Dirjen, semua.

Yang pertama tentunya yang berkaitan dengan budidaya Pak. Ini sebenarnya merupakan harapan dari masyarakat dan ini saya pikir potensi sangat besar ya. Tentu dalam hal ini kita bisa melihat persoalan budidaya ini kan masih banyak persoalan-persoalan yang memang harus di makeup Pak. Pertama, kalau kita lihat potensi ya budidaya ini sangat besar Pak, baik pun di

laut maupun di darat. Tentu dalam hal ini kita bisa melihat persoalan yang pertama masalah pakan Pak. kemudian kita lihat jenisnya, misal contohnya di Dapil saya di Aceh Pak. Itu kalau kita lihat di Daerah Pesisir kemarin Pak Dirjen sudah hadir Pak Agus ya. Terima kasih sudah hadir ke Aceh untuk acara gemar ikan. Itu hampir sebagian besar kita mulai dari Sumatera Utara itu kan Daerah Pesisir Pak. Persoalan di masyarakat hari ini disana sangat dibutuhkan yang pertama adalah udang paname Pak, kemudian bandeng. Yang kedua persoalan pelabuhan. Nah ini menyangkut ke semua. Pelabuhan misalnya di Aceh Timur di Idi itu Pak. Ini juga potensi luar biasa Pak. Cuma persoalan di masyarakat hari ini dikeluhkan oleh masyarakat adalah menyangkut fasilitas supaya mereka bisa ekspor Pak. Terutama seperti cource storage, ... tempat penyimpanan ikan. Ini yang menjadi harapan. Tentu dalam konteks seperti ini. Ini pelabuhan besar-besar Pak. Cuma kasihan Pak, ketika panen, ketika nelayan membawa ikan dari laut itu kadang-kadang karena mereka tidak mempunyai tempat. Akhirnya apa? Mereka harus jual dengan rumah. Ini disampaikan Pak Suhardi potensi ekspor ini yang sebenarnya yang harus dibackup oleh KKP ini sehingga mereka hari demi hari terus berkembang Pak. Seperti Aceh Pak. Ini kita rata-rata bergantung Sumatera Utara Pak. Tapi ketika nanti Pak Zulfikar bisa menyiapkan atau Pak Agus disana otomatis kita bisa ekspor langsung Pak. Ini ita harapkan dari masyarakat Aceh ya terutama.

Kemudian berkaitan dengan rencana Pemerintah mengekspor benih lobster Pak. Ini khususnya Pemerintah. Ini kan sudah pembicaraan dari publik. Saya ingin mendapatkan gambaran dari Pemerintah, mungkin bisa menjawab ya. Potensi benih atau ... lobster ya yang ada di laut Indonesia ini sebesar apa? Apakah 1000 ton, sejuta ton atau berapa pun. Ini kenapa saya katakan demikian padahal masyarakat dari situ. Kenapa? Karena itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita tahu betul selama Bu Susi ini semua dibatasi Pak. Padahal kalau kita bicara jujur hari ini, ini harapan masyarakat mereka ikut terlibat disitu. Tentu semuanya harus dipertimbangkan dengan matang, apa benar lobster ini akan habis atau bisa dikembangkan seperti Vietnam. Vietnam hari ini kan mereka yang mengambil keuntungan besar Pak. Nah mungkin kita bisa contoh juga seperti Vietnam sehingga kita bisa maksimalkan terhadap potensi benar lobster tersebut.

Terakhir Pak Ketua ini saya terima aspirasi dari masyarakat tadi kebetulan dari aliansi penyuluh perikanan bantu Pak (APPPI). Disini saya lihat ada 2 point disini bisa diserahkan ke Pak Sekjen. Aspirasi Aliansi Penyuluh Perikanan Bantu Indonesia. Pertama meminta kepada Sekjen KKP, segera memproses surat pengusulan pengangkatan penyuluh perikanan bantu menjadi PNS yang telah diajukan oleh Kepala BRSDM tanggal 13 Januari 2020 kepada Kementerian PAN. Yang kedua, sehubungan dengan point satu. Agar KKP menganggarkan biaya pengadaan CPNS dari pelamar PTB sebanyak 2067 orang pada Tahun Anggaran 2020. Pengusulan pengangkatan ... penyuluh perikanan 100% baik bagi kelompok usia dibawah 35 tahun maupun diatas 35 tahun dengan menggunakan keputusan Presiden seperti pengangkatan bidan PTT Kemenkes.

Demikian aspirasi ini kami. Atas perhatian mengucapkan terima kasih. Ketua Umum, Nedi Iskandar, SST Pak. Ini saya serahkan kepada Pak Sekjen. Ya Pak Ketua ya. Ini arah aspirasi yang saya terima ... serahkan.

Terima kasih.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Foto sudah diserahkan.

Terima kasih.

Baik. Orang yang berserah diri itu hidupnya akan selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan kita sekarang mendengarkan salam keselamatan dari Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Selamat PKS ya.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Ini kan saya bilang selamat sejahtera.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Para Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati,
Pak Sekjen, Pak Dirjen dan seluruh jajaran KKP yang saya hormati pula.

Ada beberapa yang terkait itu. Yang pertama, tadi disampaikan oleh Pimpinan terkait dengan pengatasan stanting yaitu program gemar ikan. Sehingga ini kalau bisa anggarannya memang ditambah sehingga. Ini karena programnya nampaknya langsung berkaitan dengan pengentasan pada contrang. Yang kedua, di Daerah saya Sukabumi Pak itu potensi sidatnya luar biasa. Dan ini potensi ekspornya juga diakui. Hanya saya belum melihat program terkait dengan pengembangan sidat. Apakah saya yang belum melihat atau memang tidak ada. Kalau memang tidak ada usulan saya, apakah nanti di 2021 itu nanti. Sudah ada. Kalau sudah ada mungkin kita ingin sinergis Pak. Jadi saya punya petaninya. Artinya membina itunya. Kita akan support dari sisi pengawasan karena ini cukup potensi, seperti itu. Yang ketiga, terkait dengan BPAT ini Pak. Jadi menurut saya hanya masalah komunikasi. Ketika kemarin saya Reses datang ke BPAT Sukabumi, ini persepsi masyarakat tentang BPAT itu adalah menjadi pesaing bagi petani. Ini saya mendengarkan langsung dari petani. Menjadi pesaing karena BPAT juga menjual. Tetapi setelah saya datang ke BPAT juga informasinya kurang. Sehingga waktu itu nampaknya harus

difasilitasi. Ada komunikasi yang bagus antara BPAT dan. Karena masyarakat menyatakan bahwa keberadaan BPAT di Sukabumi belum dirasakan oleh masyarakat Sukabumi. Nah ini kan hanya sepihak tapi paling tidak menjadi informasi bagi Bapak-Bapak yang ada di Kementerian.

Yang berikutnya, ini terkait dengan program Pak. Dari catatan saya dulu terkait anggaran Setjen. Anggaran Setjen catatan saya ini cukup besar untuk pembangunan sarana-prasarana olahraga sampai 5,2 M. Nah maksud saya keterkaitan program ini dengan program utama nasional kita terkait stunting dan lain-lain ini dimana. Jadi kita memahami sih kalau karyawannya sehat ya Inshaa Allah kerjanya semangat. Hanya dalam skala ini mungkin bisa dijelaskan 5,2 ini kira-kira untuk apa. Dan juga saya ingin mendapatkan gambaran pembangunan ruang kontrol terpadu. Jadi kalau di Kementan kemarin kita sedang “dengan war room (AWR)” ini disini muncul lagi pengembangan ruang kontrol terpadu. Mungkin saya bisa mendapatkan gambaran penjelasan kayak apa desainnya, dan fungsinya nanti mungkin bisa diinformasikan itu.

Dan terkait dengan asuransi dari Dirjen Perikanan Tangkap Ada beberapa program asuransi. Sukabumi juga salah satunya juga Jawa Barat ada tercatat disitu. Saya ingin bagaimana mekanisme itu yang terkait dan siapa yang berhak mendapatkan asuransi itu sehingga nanti kita sebagai Wakil Rakyat bisa memberikan minimal juga informasi. Syukur-syukur bisa advokasi. Itu saja Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Wa'allaikumsalam

Terima kasih.

Kalau kita ingin hidup selamat maka setiap hari kita harus minta petunjuk pada Kanjeng, Kanjeng Darori.

Dipersilakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua, teman-teman Anggota, Pak Sekjen, Pak Dirjen.

Saya hanya beberapa hal yang perlu mengingatkan pengalaman yang lalu bahwa pengelolaan anggaran di KKP itu terjadi sampai disclaimer ya. Ini jangan terulang lagi. Disclaimer ini terjadi, kenapa? Karena kelembagaan di KKP dulu gemuk diatas. Jadi tidak mampu Pusat mengelola uang sebesar itu.

Dan ... dengan permintaan Pak Presiden kelembagaan ini harus diperbaiki. Di Pusat tidak ada Eselon III. Pengalaman saya lihat di Kalimantan Barat di Pontianak itu pengawasan membawahi 4 Provinsi itu Eselon IV. Saya kira tidak tepat itu. Saya kira seperti di Kehutanan itu 3 bulan ... ini daerah Pak. Kenapa KKP tidak ikut. Ini adik-adik kita yang Eselon III disuruh ... saya yakin maulah itu. Mau ya? Mantuk-mantuk itu Pak Sekjen. Jadi ini perlu. Jadi kalau kedepan anggarannya itu dikembangkan banyak dilapangan itu lebih mudah dan Pusat itu lebih banyak melakukan pengawasan. Untuk 2020 tadi pagi katanya sudah ada pembicaraan dengan Pimpinan dan kalau memang itu sudah sepakat dengan Pimpinan, dengan kita, saya kira tidak ada masalah. Karena ada pergeseran-pergeseran yang perlu disepakati untuk disahkan.

Nah untuk 2021, ini bulan ini harus sudah merancang. Tolong Pak Sekjen minimal ya kita kembali lagi 2 kali lipat anggaran tahun ini. Cara ... gampang Pak, misalkan teman-teman Dapil ini ada 50 orang ya. 1 Dapil dikasih 50 Miliar sudah 2,5 Triliun. Kegiatannya nanti bisa ditanyakan, banyak itu. Jadi saya kira tadi Pak Salim sudah mengusulkan teman-teman di Banggar dengan teman-teman dari KKP juga dengan Ketua dibahas. Minimal 2 kali lipatlah karena laut kita paling luas kok. Itu saran saya.

Yang kedua, di budidaya saya kira ini lebih banyak dikembangkan lagi Pak Slamet ya. Karena luar biasa. Karena Dapil saya itu Dapil Kebumen, Banjar, ... itu daerah termiskin di Jawa Tengah. Dengan adanya sekarang kemarin terima kasih nabur ikan di Waduk Sempor 100.000 ekor itu akan berkembang ke masyarakat nanti walaupun itu lepas ke sawah, kemana itu akan ditangkap dan untuk dimakan. Saya kira itu tidak ada masalah. Saya kira ini perlu dikembangkan.

Terus yang ketiga, ini soal garam Pak. Ternyata garam di Kebumen itu putihnya lebih putih daripada tissue. Tapi pada waktu ada PT Garam disini kami jadi ragu. Wah ini belum saya teliti, belum kami lihat. Tolong dikoordinasikan ini karena 3 Pak Dirjen sudah kesana itu bagus itu. Bahkan saya tanya, ekonomis tidak itu. Belum dihitung. Jadi seolah kita digembosin inginnya mau impor saja garamnya. Tidak boleh gitu. Saya kira teman-teman ini suatu terobosan di KKP. Garam yang putih ya. Saya kira suatu saat mungkin Komisi IV bisa lihat. Saya baru tahu ada garam seputih itu.

Terus yang terakhir ini. Saya sudah kontak Prof. Syarif. Ini laut Kebumen terpanjang ya. Tapi nelayannya itu cari ikan di pinggir pantai. Baca GPS saja belum pernah tahu. Bagaimanalah kemarin saya bicara diberi peningkatan SDM-nya. Ini diambil dari Pangandaran saja itu Saya tidak tahu apa mau jadi pembodohan di Kebumen, saya tidak tahu. Jadi ini saran saya Pak Dirjen, Pak Sekjen. Untuk 2021 saya kira sudah mulai. Dikembalikanlah gitu tapi organisasinya sampai dimana sekarang kelembagaan dari KKP. Kalau ditempat lain sudah selesai. Kalau belum tadi yang saya sampaikan Pontianak misalnya Eselon II itu wong 3 Provinsi pengawasannya dan dia Provisini dibikin beda Eselon III jadi banyak Pak. Jadi Bapak-Bapak ke atas ringan bebannya itu.

Saya kira demikian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Terima kasih.

Ada sosok orang yang tenang, kalau bicaranya lembut. Inilah orang yang senantiasa mengabdikan pada pekerjaan dan profesinya. Dan itu orang mengabdikan pada Allah yang bernama Abdullah.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Dirjen beserta jajarannya, Rekan-rekan sekalian Anggota DPR RI Komsii IV.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Sudah banyak hal yang saya selalu sampaikan soal potensi Maluku. Dan potensi ... ini kalau diolah ini kontribusi yang sangat besar untuk Pemerintah. Kalau saya lihat yang ada memang kita tidak bisa komentar apa-apa karena dananya sangat kecil sekali. Saya juga Anggota Banggar dan saya juga harus bersikap untuk di Banggar. Kalau tidak kapan Maluku itu dia bisa potensinya bisa digali.

Untuk itu pada Pak Dirjen Tangkap, saya kira soal ... regulasi ya tentang halal yang rumpun dan lain-lain, soal halal yang. Pokoknya yang terkait yang pernah saya share. Tidak perlu saya ulangi lagi karena itu menjadi catatan. Saya lihat disini bahwa perencanaan dan kegiatan ini kan menyenangkan saja. Cuma menyenangkan mungkin ya Anggota Komisi IV. Kalau saya lihat ini belum menyentuh dan belum tepat sasaran. Nah karena sangat kecil. Ya kalau 5 ... Cuma 3 buah ya untuk apa kalau 3 buah ini Maluku Cuma dapat 1. Tapi saya kira tidak ada masalah karena anggarannya sangatlah kecil.

Yang kedua, mudah-mudahan Pak Dirjen kedepan ini kita lebih profesional dalam perencanaan. Karena ini walaupun kecil saya lihat perencanaan juga belum begitu bagus, belum tepat sasaran. Ya saya akan bantulah kalau disana, karena terus terang saja saya juga memang saya dari orang perencanaan, awalnya juga. Jadi kalau bicara soal perencanaan saya agak sedikit ngerti. Saya mau Maluku bagus, saya mau Indonesia bagus. Maluku sejahtera, Indonesia sejahtera. Tanpa Maluku tidak ada Indonesia. Dan tanpa kita semua yang ada disini dengan program yang bagus dan tidak berhasil maka kesejahteraan kita juga tidak akan berjalan baik. Inshaa Allah kedepan kita akan bantu. Dianggaran pun kita akan bantu.

Yang kedua, ini kan soal budidaya. ... kita kan baru mau mulai ini. Bersyukur kalau di Maluku ini sudah bahwa ada kuraang lebih ratusan atau 1

juta mungkin benih itu juga ada di Maluku. Kita punya pengalaman bahwa kalau budidaya di laut, kalau pakannya tidak bagus ikannya hidup tapi tidak mungkin akan besar. Ini pengalaman. Untuk itu kalau memang 200 sekian juta benih di 34 Provinsi apa sudah dipikirkan, tingkat keberhasilan berapa persen, dan tingkat kegagalan berapa persen. Saya kira kalau Indonesia Timur kalau syukurkan 10% bisa berhasil. Mungkin 90% bisa tidak berhasil. Untuk itu untuk mencapai suatu keberhasilan itu maka saya minta dari Pak Dirjen Sumber daya itu agar Maluku juga disiapkan mesin pakan. Karena mesin pakan itu juga merupakan satu perorang kedepan. Karena disini bukan benih saja. Tapi induknya juga disiapkan. Berarti untuk kedepannya sudah diprediksi bahwa budidaya ikan tawar ini atau laut ini itu kira-kira tingkat keberhasilan sampai dimana. Itu sekali lagi saya ingatkan Pak Dirjen, saya kira ini juga sangat penting.

Yang kedua, ini benih mungkin satu wilayah tidak tahu 500 atau 1 juta benih. Ini mau diapain. Kan benih kalau umpamanya mungkin di Jawa. Tapi di Maluku dengan yang lain itu kan ada karamba. Selalu ada karamba. Apa sudah dipikirkan bahwa perlu ada karamba atau tidak. Kalau tidak ada juga agak susah. Dan berikan untuk ada karambak Pak Dirjen saya kira masyarakat tidak memiliki kemampuan. Itu pasti harus dipikirkan untuk Bapak angkat. Mungkin orang yang memiliki kemampuan yang bisa sama-sama mungkin membantu modal dan lain-lain. Karena kalau tidak, tidak akan mungkin dia berhasil.

Yang ketiga Pak Dirjen, saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya kita di Dapil kita lebih tahu potensi wilayah. Salah satu contoh, bahwa ada cost storage, ada gudang pendingin. Di Maluku di taruh di Buru Selatan. Setahu saya kalau Buru Selatan itu sangat cukup jauh. Lampu juga kita tidak tahu taruhnya dimana. Lalu ... mobil pendingin. Mobil pendingin mau dikemanakan. Kalau di ... taruh saja di Namrole. Nah Narmrole harus lewat Puru. Padahal Puru kalau dikasih ... juga sangat cukup berat. Jadi saya kira, ini kira-kira alasan apa sehingga harunya kesana. Kalau menurut saya itu mungkin kedepan kita besar-besaranlah. Kita bantu Bursel dengan gudang pendingin atau cost storage. Kita bantu dengan termoking tapi kita bantu juga dengan kapal-kapal angkut. Kalau tidak ini pasti akan menjadi besi tua. Untuk itu saya kira kedepan atau kegiatan ini kalau bisa. Kalau kita lihat kan sudah ada, apakah masih bisa bergeser ke Kabupaten lain. Ini yang saya kira sangat cukup bagus. Ya Pak ya?

Saya kira cukup.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Terima kasih.

Kita berharap para penguasa laut itu menjadi orang kaya seperti Nabi Sulaeman. Jadi silakan Pak Sulaeman Hamzah.

F-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Terima kasih Ketua,

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Sekjen, dan Bapak-Bapak para Dirjen dan seluruh jajaran.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya sedikit saja Pak Pimpinan, di Papua Tahun 2020 ini ada PON disana. Dan hampir dipastikan di Danau Sentani yang besar itu belum terisi, belum menghasilkan banyak untuk Papua. Nah karena itu kesempatan ini saya minta karena PON-nya Oktober barangkali ada kesempatan bisa dipastikan, berapa bisa kita dapatkan benih ikan untuk budidaya di Danau Sentani. Itu yang pertama. Di tempat lain juga banyak yang minta tapi saya kira lebih prioritas untuk Danau Sentani karena ini ada kepentingan dengan PON tadi.

Yang kedua, tidak berarti saya harus menuntut lebih banyak tetapi memang sekalipun anggaran kecil tapi sesuatu yang sudah dirintis sebelumnya. Jadi kita minta kepastian Pak. Dari daerah juga meminta kepastian kelanjutan dari pembangunan Samudra. Di Biak misalnya, itu juga perlu ada penjelasan. Kemudian di selatan di Merauke yang tempo hari juga sudah ditetapkan jadi pelabuhan Samudra. Selanjutnya untuk operasionalnya barangkali perlu ada penjelasan lebih lanjut sehingga kalau ada pertanyaan semacam itu kami bisa menjelaskan kepada konstituen yang ada didaerah.

Kemudian untuk perikanan tangkap, beberapa kali yang kami usulkan untuk wilayah Dapil Papua memang sampai sekarang juga belum terpenuhi semua tetapi saya paham bahwa ini anggaran kecil dan tidak mungkin bisa dialokasikan untuk memenuhi semua permintaan. Walaupun demikian Pak Sekjen, wilayah saya ini kan unik Pak. lautnya luas tapi juga penduduknya itu masih sangat miskin terutama nelayan ini yang masuk ke sungai-sungai ini mereka tidak bisa berdaya apa-apa. Dan kalau mungkin bisa ditambahkan alat tangkap berupa ketinting saja Pak. Ketinting kan harganya Cuma sedikit saja, 2 juta kira-kira begitu dibantu dengan alat tangkap. Dan perahunya saya kira ini akan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat disitu. Wilayah pesisir yang dibantu itu memang lebih banyak pada masyarakat, nelayan yang sudah mapan. Sementara yang di kampung-kampung ini kan tetap iri dengan situasi semacam itu. Padahal tujuan kita itu mensejahterakan masyarakat tanpa memilih dia di pantai atau pun di gunung. Oleh karena itu kesempatan ini saya minta tolong bisa dialokasikan untuk wilayah Papua ini kalau bisa di bantu ketinting atau alat tangkap.

Saya kira 2 hal itu yang saya perlu sampaikan selain budidaya tadi dan juga pelabuhan samudra. Mungkin ada penjelasan nanti Pak.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Wa'allaikumsalam

Terima kasih.

Ada satu hal lagi yang menjadi bahan kita untuk terus melakukan evaluasi tentang ikan ini. Orang-orang gunung itu sukanya makan ikan Pak, tapi ikannya ikan asin. Nah akhirnya ikan asinnya tinggi konsumsinya. Konsumsi nasinya tinggi. Dampaknya adalah angka tekanan darah tinggi, stroke dan penyakit jantung itu ada didaerah-daerah yang justru tenang, dingin. Nah ini kedepan barangkali kita terus mendorong agar ikan asinnya tetap ada tapi memiliki kualifikasi yang baik untuk kesehatan. Karena enak. Udaranya dingin makan ikan asin pakai sambel, tidur pakai sarung. Wah itu dah, istrinya 3. Uuh sudah nyenyak.

Pak Kyai, Pak Muhtarom sekarang bagiannya.

Silakan. Dia ingin punya istri 3 tapi tidak kesampean doanya.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos):

Keinginannya ada tapi keberaniannya tidak ada.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan Bapak/Ibu semuanya.

Kami ini Jatim VIII ini tidak punya laut. Ya tentunya harapan saya adalah bagaimana program-program dari KKP ini proporsional antara wilayah yang punya laut dan wilayah yang tidak punya laut. Kemudian tentunya dari wilayah yang tidak punya laut, ini program harapan saya yang perlu diperhatikan adalah yaitu tadi disampaikan bio yang di flog Pak. Saya ikutin saja senior. Kenapa? Ini sangat bermanfaat karena titik-titik wilayah tertentu yang biasa banjir dengan adanya bantuan-bantuan bio yang di flog ini sangat-sangat membantu dan tidak ada gangguan dari hewan yang lain. Kalau kolam dibawah ini biasanya diwaktu kita mendekati musim panen itu biasanya ada serangkan dari hewan-hewan yang lain Pak. makanya ini bagaimana nanti di Dapil Jatim VIII ini program yang ditingkatkan adalah bioflog.

Kemudian dititik-titik tertentu khususnya di Madiun ini ada 5 Waduk, kemudian ada 61 kelompok tani ikan. Ini kemarin menyampaikan bahwa di sana ini yang cocok budidaya air tawar masih sekitar lele, kemudian nila, kemudian gurame ini panennya terlalu lama 1 tahun. Kemudian akhir-akhir ini patin. Harapan saya nanti teman-teman yang dari Dapil VIII ini ada program yang terkait dengan penyesuaian wilayah.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada program edukasi atau sosialisasi. Karena kebanyakan peternak ikan ini kalau sudah panen semuanya dijual Pak. Padahal maunya kita ini dalam rangka untuk mengurangi stanting atau menghilangkan stanting. Tapi faktanya itu yang kalau panen raya semua dijual. Akhirnya peternaknya cukup makan tempe seperti Pak Ketua tadi makan

ikan asin itu tadi, maka ini bagaimana ada program terkait dengan sosialisasi atau pelatihan dan lain sebagainya.

Mungkin ini Pak Ketua, terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Terima kasih.

Beberapa waktu yang lalu itu ada juru bicara suda empire itu namanya Rangga selalu ngomong tentang Alien dan Delan. Alien itu diambil dari Sundalin sebetulnya. Sundaline itu artinya sebuah hamparan laut yang sangat luas. Dan kita punya saudara yang memperjuangkan betul urusan kelautan di Maluku namanya Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Memang Ketua saya ini hebat banget ini.

Alien ... (Lumbung Ikan Nasional). Ada di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Benar tidak itu Pak Abdullah.

Baik terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak Dirjen beserta jajarannya,

Pak, mohon maaf kemarin saya sudah sampaikan ada acara mancing di Maluku Utara. Inshaa Allah akan disampaikan ke Pak Menteri langsung juga melewati Bapak juga ini saya sampaikan. Acaranya ditunda sampai bulan Maret. Tadinya di Bulan Februari, nah sekarang di Bulan Maret Pak.

Bapak Dirjen,

Saya ingin menyampaikan ada. Saya ada 3 menit ya. Lebih tidak apa-apa ya?

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Tapi jangan baca konsep lagi kayak titipan itu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ini bukan konsep, ini kan dari daerah nih Pak haru kita bacakan itu.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Siap.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Kita harus sampaikan keadaan didaerah kita. Alhamdulillah karena saya dari Partai yang Nomornya 4, jadi saya ada 4 pertanyaan. Satu, saya ingin menyampaikan Dirjen Perikanan Tangkap. Saya melihat dan mencermati bahan yang diberikan kepada kami itu mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya menginginkan bahwa kapal yang akan dibagikan ke masyarakat, para nelayan ini kalau bisa juga berskala jangan yang besar-besar tapi di 5 gross ton juga bisa menjadi. Kalau bisa diperbanyaklah. Karena memang. Khususnya di Provinsi saya dan Indonesia Timur memang luas wilayah kami lebih besar daripada. Luas lautan lebih besar daripada luas daratan. Jadi mohon bisa dipertimbangkan.

Dan juga yang kedua, berdasarkan dari bahan yang dipaparkan bahwa ada operasional SKPT salah satunya adalah pelabuhan perikanan untia. Dari data dan fakta yang ada dilapangan PP untia sudah diresmikan oleh Presiden beberapa waktu lalu tapi geliat dan usaha perikanan disana tidak terlalu bagus atau baik. Saya melihat dari anggaran terdapat lebih dari 17 Miliar Rupiah. Yang dialokasikan untuk operasional bukan hanya di Untia tapi di Natuna, Samlaki, Marauke, Sambatik, Semoeluwu, Dago, Cikidang dan Teluk Awang, untuk rilnya tidak harus operasional tapi dialokan untuk bantuan Pemerintah agar geliat usaha berkenan menjadi ramai disana Pak.

Yang ketiga halaman 6, terdapat partisipasi RFIO dan Internasional Cost Business Forum (ICBF). Disini adalah anggaran lebih dari 6 Miliar yang mana kita sebagai Anggota Komisi IV tidak dapat informasi apa pun tentang event ini. Anggaran ini lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk bantuan Pemerintah seperti 10 dan 15 gros ton. Alat penangkapan permesinannya kapal dan BBM yang manfaatnya jauh dirasakan oleh pelaku utama perikanan atau para nelayan Pak.

Yang keempat, lagi-lagi dihalaman 6 observer atau pengumpulan data diatas kapal namun data ini menjadi tidak jelas karena basic data KKP dengan Dinas dan BPS tidak sama. Selain itu anggaran ini sangat besar senilai 7,7 Miliar.

Ketua,

Ini juga perlu kita cek. Apa efektifnya?

Terus saya ingin sampaikan bahwa untuk Sekjen dan Dirjen Perikanan Budidaya, Dapil saya Maluku Utara dimana dinobatkan sebagai lumbung ikan nasional. Seharusnya Provinsi Maluku Utara ada unit pelaksanaan teknis atau UPT Pak sekelas balai benih ikan air laut yang melayani pulau-pulau daerah Timur. Saya meminta agar hal ini dapat dialokasikan.

Untuk Dirjen Penguatan Daya Saing saya melihat dari paparan di bahan tidak ada bantuan Pemerintah yang bisa disampaikan ke pengelola dan pemasar hasil perikanan. Seperti cool box, alat pengemas dan yang lainnya yang lebih berguna bagi masyarakat. Kemarin waktu kita RDP langsung dengan Pak Menteri saya sudah sampaikan bahwa didaerah saya memang

penghasil ikan tapi kami juga membutuhkan untuk memang kalau kita diberikan cool box, untuk pembuat ice. Tapi kalau kita tidak punya listrik dan BBM susah percuma Pak. Jadi kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa dari setiap daerah dari Provinsi Maluku Utara ada 10 Kabupaten/Kota mereka mengirim surat langsung kepada saya. Dan ada juga Pak Gubernur Provinsi Maluku Utara sudah bertemu langsung dengan Pak Menteri untuk menyampaikan. Tapi lewat dari RDP ini saya juga ingin menyampaikan bahwa tolong dibantu Provinsi kami terkhususnya daerah Timur, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, ada NTT, ada NTB, juga ada bagian Sulut terpinggir. Jadi mohon bantuannya dan atensinya.

Terima kasih Pimpinan. Saya tidak lebih dari 3 menit.

Sampurasun.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Terima kasih.

Rampes.

Kita dengarkan lagi Dokter kita yang suaranya agak kecil tapi panjang. Dokter Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Bismilahiramanirrahim.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Anggota Komisi IV dan Sekjen, Dirjen KKP yang kami hormati semuanya.

Pertama saya ingin menyampaikan KKP ini agak kurang literasi dan narasi terkait dengan soal pembangunan kelautan dan perikanan. Nah ini nampaknya dampak dari kecilnya anggaran. Saya juga tidak tahu nih apa memang tidak ada gagasan baru atau memang dijatah sekian. Nah semestinya kita berharap karena ruang laut ini, ini sangat penting buat di Indonesia. Karena ada 2/3 luasan permukaan Indonesia ini adalah laut. Jadi kita harus memperkuat literasi dan narasi kelautan dan perikanan ini, baik dari aspek strategi, program dan kegiatannya. Sehingga kita sebesar-besarnya dapat mengambil manfaat karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita konstitusi. Bumi dan air ini adalah dikuasakan oleh negara. Tapi itu ada syaratnya yakni bagaimana kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Dan kemakmuran untuk rakyat sebesar-besarnya. Nah saya pikir dengan anggaran seperti ini agak sulit kita membangun kelautan dan perikanan ini. Sementara ruang laut kita ini sangat luas dan sulit dikontrol. Didaerah-daerah terluar kita laut ini. Ini kita tidak tahu seperti apa pihak-pihak asing mengambil manfaatnya. Misalnya saja Natuna. Nah Natuna ini disitu ada setidaknya-tidaknya 5 negara yang berkecamuk disana. Pertanyaan kita adalah apakah KKP mengkonsentrasikan agenda-agenda atau program untuk menjaga dan

mengambil manfaat di Laut China Selatan itu. Apalagi kita ini memiliki dan diakui oleh PBB memiliki kawasan ZEE. ZEE ini adalah berangkat dari unclose Tahun '92 bahwa dunia mengakui bahwa kawasan Indonesia itu laut dan darat. Dan pada masa lalunya Indonesia itu hanya pulau-pulau. Sekarang kawasannya itu adalah laut dan darat. Dan kalau ada China mengatakan bahwa ... lain itu adalah termasuk Laut China Selatan itu sampai sekarang belum ada hukum dunia yang mengakuinya. Nah saya pikir ini memang kita harus membuat sebuah literasi dan narasi yang kuat dan kokoh untuk menjaga kawasan itu. Dan ini tidak hanya Natuna. Tapi juga kawasan-kawasan terbuka lain di Indonesia ini hanya KKP yang tahu. Nah seperti apa pengelolaan daerah-daerah ZEE yang terluar dan terjauh itu. Potensi alam sangat banyak, ikannya banyak, kemudian potensi dasar lautnya juga banyak. Nah ini saya melihat program-program kita ini relatif hanya bersifat reguler saja. Tidak ada program yang bersifat untuk memberikan suatu penguatan terhadap pemfaatan sumber daya laut ini untuk menjaga NKRI kita. Nah oleh karena itu saya memandang perlu untuk anggaran-anggaran berikutnya ini mohon ada pengkajian secara mendalam bagaimana daerah-daerah yang mempunyai potensi besar itu kita manfaatkan dengan mengerahkan nelayan-nelayan kita. Nah karena itu nelayan kita harus kita beri program dengan kapal-kapal yang memadai. Jangan sampai kapal-kapal kecil nelayan yang tidak sanggup kesana baru ditiup angin sebentar sudah tenggelam. Saya minta KKP menganggarkan sebuah kapal untuk nelayan untuk mengarungi Laut China Selatan sana. Sehingga Laut China Selatan itu betul-betul kesejahteraannya buat bangsa kita, bukan buat asing, bukan dicuri untuk asing.

Nah ini saya minta nanti anggaran yang berikutnya ini jangan terlalu. Kita jangan pesimis Pak Sekjen. Jangan pesimis. Anggaran kita ini kan banyak.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Belum Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Masih ada?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Iya masih. Ini masih tahap pencerdasan.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

3 menit Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ya ini baru 2,5 menit.

Sedikit lagi Pak.

Nah jadi ini perlu ada penganggaran yang kuat, ada program yang kuat, ada pemberdayaan sumber daya manusia yang kuat. Nah saya minta supaya dari aspek pemberdayaan sumber daya ini pun harus diperbaiki. Sekarang ini kita belum mendapatkan suatu kepastian tentang sumber daya manusia kita terkait dengan penyuluh perikanan bantu. Nah kami minta juga ini supaya penyuluh perikanan bantu pun ini juga diperbaiki statusnya maupun kesejahteraannya. Dan juga tolong diperbaiki juga penghasilan-penghasilan rutinnya supaya mereka pun juga semangat. Nah tentunya ini kepentingan pembangunan perikanan baik laut maupun darat.

Nah kami menyampaikan terima kasih kepada KKP sejauh ini sebenarnya programnya sudah berbasis masyarakat. Dan juga berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di sektor nelayan. Tapi ini perlu diperkuat. Kalau dengan anggaran segini saya pikir kita stag lagi. Saya pikir ini memang perlu baik program budidaya darat maupun juga dilaut tangkap.

Demikian Pak Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Wa'allaikumsalam.

Nah agar kapalnya sampai ke Natuna anggarannya harus baik, kapalnya harus baik, nahkodanya harus baik, dan mengikuti petunjuk. Dah akhirnya petunjuk yang baik itu adalah agama, Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan Komisi IV dan seluruh Anggota yang hadir sidang yang terhormat, Para Pejabat KKP kita dan seluruh jajarannya, Pak Sekjen, dan beberapa Dirjen yang hadir yang kami hormati, dan Seluruh yang hadir tamu undangan baik yang duduk di balkon atau di ruangan yang saya hormati.

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Pak. pertama, kami ingin menyampaikan bahwa ada berita KKP telah memberikan ijin atau rekomendasi atau RIPH tentang rekomendasi urusan impor garam. Itu kita waktu ada pertemuan dengan beberapa stakeholder, dan dengan PT Garam juga. Katanya KKP sudah memberikan rekomendasi. Kalau itu sudah kami sebetulnya sangat menyayangkan karena memang petani kita juga sedang ambruk ini. Petani garam kita juga. Harusnya mereka dimuliakan. Kalau belum Alhamdulillah dan mohon untuk kedepan fokus petani garam kita jauh lebih

dimuliakan daripada petani garam bukan Indonesia yang ada di Luar Negeri. Artinya jangan terlalu kita impor terus, garam juga lebih baik Inshaa Allah. Makanya waktu PT Garam berbusa-busa ngomong garam yang berkualitas tinggi. Kami ini bukan kuliah disini. Kami ingin tanya, Saudara rugi atau untung? Kenapa petani garam kita banyak yang tidak beruntung. Kami tanya begitu. Jadi kita disini memberikan pikiran bukan dari sisi akademiknya, dari sisi kebijakannya.

Yang kedua Pak Sekjen, ini aspirasi sejak Bu Susi jadi Menteri KKP. Di Kabupaten Tasikmalaya di Dermaga Cimanuk itu ada water briker. Break water. Yang itu pembangunannya kata Kang Dedi Sumogol. Jadi Sumogol bentuk Artinya tidak selesai-selesai. Arti dalam bahasa lain mangkrak. Mohon diperhatikan. Saya dulu pernah 4 tahun yang lalu bilang, dan mungkin Pak Sekjen masih ingat. Anggaran ini tidak memenuhi asas keadilan. Pangandaran tinggi banget. Kalau Tasik tidak ada banget gitu. Nah dulu di Pangandaran Bapak. Nah kira-kira hari ini kita ingin perhatian, mana yang Kabupaten Tasik, dan Kabupaten Garut.

Yang kedua teman-teman ada forum komunikasi kelompok usaha bersama yaitu nelayan pamayang dan seluruh nelayan Tasik Selatan, Cipatujah maupun Cikalong. Mereka minta eskafator. Dan sudah 5 tahun mengajukan tidak pernah dikasih. Nilainya tidak mahal 1,2 Miliar kok. Murah sekali kalau anggaran negara. Apa mahalnya. Siapa yang bilang mahal. ... itu. Pak Bupati serius ... itu mahal. Masa begitu Pak Bupati. Ini kan untuk kesejahteraan nelayan. Pak Sekjen mohon dicatat, saya ingin tahun ini direalisasikan.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

(suara tidak jelas)

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Siap Pak. Tenang Pak, tenang. Asas keadilan harus ada.

Ada 2 lagi. Ijin ya.

Nah ini membawahi 68 KUP. Jadi yang meminta itu 68 KUP se-Tasik Selatan, sepantai Tasik ya. KUB itu Kelompok Usaha Bersama.

Yang ketiga Pak, ini kita hanya menyampaikan aspirasi. Di Daerah Selatan ini rusak berat pesisirnya. Apalagi Cipatujah. Sayang Pak Dedi tidak jadi Gubernur. Jadi pasir besinya dirusak sampai Sukabumi. Artinya lahan laut yang rusak berat Pak karena pasir yang digali. Nah ini butuh perhatian dari kelautan walaupun memang ada kewenangan Provinsi. Tapi juga ada kewenangan kelautan dari sisi pesisir karena pasir besi itu di Pesisir posisinya. Mohon itu ada pengawasan pesisir kita yang ditingkatkan Pak. dan ini akan menjadi warisan yang buruk sebab kondisi laut kita yang sudah rusak berat pesisirnya. Itu pasir besi jutaan tahun proses alamiah. Tuhan menciptakannya.

Bukan kun fakayakuun 1 hari tapi jutaan tahun dan habis dalam waktu 10 tahun. Ini karena keserakahan manusia. Kalau bisa kita dorong mangroofnya ditanamin. Jangan dibiarkan tandus, rusak berat kondisi pantainya.

Ini kira-kira yang paling penting yang ingin kami sampaikan. Hal-hal lain yang ingin saya sampaikan. Anggaran negara KKP itu harus habis tidak boleh sisa. Kalau habis nanti baliknya besar lagi. Kan Pak Dedi sudah bilang. Jadi ... gelombang energi itu kalau lepas 1 kembali 10. Kalau menurut Pak Kyai Hasan menyetir 1 Ayat Al-Quran menyebut begini, ma minal hasanat filla asyaro amsaliha minal hasanah, tidak ada satu kebijakan yang dilakukan kecuali Allah berikan 10 kali lipat untuk pengembaliannya. Nah kalau KKP berlindung hari ini tidak ada duit, tidak ada duit, salah. Habisin saja duitnya yang penting untuk rakyat.

Terima kasih.

Sampurasun.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Rampes.

Baik, Bapak dan Ibu,

Kita sepakati tinggal 4 lagi kita tuntaskan. Dan kita sepakati nanti setelah tuntas 4 istirahat setengah jam masuk tinggal jawaban.

Setuju tidak?

Sepakati itu?

Jangan sampai setelah ini nanti bruk lagi 20 orang, nanti semua nanya lagi. Padahal tidak pernah ikut dari awal. Setuju tidak?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Semua orang kalau sudah sukses ingin jadi bangsawan. Dan bangsawan diberi gelar Andi Akmal.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Ketua.

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Sampurasun.*

Pimpinan dan Anggota dari Sekjen, Dirjen, dan Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Jadi begini Pak Ketua karena saya 5 tahun yang lalu saya dan Pak Mindo di Komisi IV. Jadi awalnya anggaran KKP ini kan 11 Triliun kalau tidak salah Pak ya. Kemudian mengalami penurunan terus karena tidak bisa dihabiskan. Nah oleh karena itu Pak Sekjen saya berharap ini Pak Sekjen saya berharap ini Pak perencanaan anggaran kedepan ini diperbaiki Pak.

Yang kedua, walaupun teman Banggar ini punya semangat ingin memperjuangkan anggaran KKP 2021. Tapi itu semuanya harus berawal dulu dari pembicaraan Menteri atau Sekjen dengan Pak Presiden dan Menteri Keuangan dan Bapenas Pak. Karena di Banggar itu agak sulit memang kalau anggaran pagu indikatifnya itu agak berat untuk dinaikan.

Oleh karena itu Pak Ketua, saya harap kita dorong agar Kementerian KKP ini Pak Menteri, Pak Sekjen menyakinkan Pak Presiden dan Menteri Keuangan dan Bapenas bahwa kita punya kebutuhan anggaran 2021 yang sangat besar. Itu yang pertama.

Yang kedua Pak Sekjen, karena judul tema kita ini kan tema anggaran. Jadi kita fokus ke masalah anggaran. Untuk Sekjen sendiri saya juga agak heran karena dari anggaran 457. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada saya anggaran pengeluaran administrasi dan pengadaan barang dan jasa 250 Miliar. Ini mungkin nanti dijelaskan saja karena waktu pembahasan kemarin kita tidak berbicara secara detail.

Kemudian pelayanan pengelolaan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan. Ini apa outputnya Pak? Cukup besar ini Pak. Kalau Humas mungkin saya bisa pahami. Tapi kalau pengeluaran data statistik ini saya selama 5 tahun yang lalu tidak pernah mendengar output dari kerjaan ini kalau ada Bironya ya. Kira-kira nanti bisa dijelaskan Pak Sekjen. Itu yang pertama.

Yang kedua, untuk Dirjen Tangkap Pak Zulfikar ya. Memang ini anggaran yang cukup besar Pak ya. Tapi disini kita melihat pengadaan bantuan juga sangat sedikit. Saya tidak berbicara karena sangat sedikit anggarannya. Cuma disini ada yang menarik untuk pengelolaan kawasan nelayan. Nah disini mungkin nanti saya usulkan 2021 atau mungkin tahun ini untuk didaerah Kabupaten Bone ada daerah nelayan di Bajuo yang sangat padat nelayannya. Ini bisa menjadi contoh Pak. Mungkin Bapak ada contoh-contoh yang berhasil dari program ini, misalnya di Sulawesi dimana, di Maluku dimana, di Jawa dimana sehingga kita bangga Pak bahwa ini ada contoh pengelolaan kawasan yang sudah dilaksanakan oleh KKP.

Kemudian untuk Dirjen Budidaya Pak Slamet ya. Selama 5 tahun ini cukup bagus Pak kinerjanya Bapak dan programnya ke masyarakat. Cuma saya menginginkan Pak supaya bantuan Bapak itu mungkin bisa diperkecil terutama mungkin untuk rumput laut. Rumput laut ini saya lihat sudah ada beberapa ya program-programnya. Cuma yang dibutuhkan masyarakat kalau saya lihat di laut bawah itu adalah tali dan pelampung sebenarnya. Kalau bibit mereka itu sudah banyak. Jadi mungkin perlu ada cluster tertentu, daerah tertentu. Kalau di Dapil saya ini cukup besar potensi rumput lautnya. Pak

Slamet ...mungkin saya bisa minta nanti dibuatkan program ini. Karena itu nilainya agak besar Pak. itu kan tali tidak seberapa tapi kita bisa bagi-bagi per rumah tangga Pak. Ah kalau sudah politisi ini kan sebenarnya paling bagus Pak kalau bagi-baginya per orang karena suaranya per orang. Kalau per kelompok ini biasanya hanya Ketua kelompoknya yang pegang. Nah ini yang jadi masalah. Begitu Pak ya. Jadi Pak Slamet ini tolong untuk bisa dipikirkan nanti kita bisa bagi banyak Pak program ini kepada masyarakat di Dapi.

Yang terakhir kepada Pak Daya Saing Pak. Saya hanya ingin mengingatkan saja pengadaan yang lalu Pak. Ini banyak yang bermasalah. Kalau ini mungkin masih bisa diperbaiki ya, dan masih bisa ditelaah sehingga tahun depannya atau tahun ini tidak ada lagi ... pengadaan yang kira-kira tidak dibutuhkan oleh masyarakat kita atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Pak. Saya berharap di pengadaan di KKP ini jangan berdasarkan pesanan Pak, jangan. Tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat kita. Karena kalau kita melihat 5 tahun yang lalu ini banyak sekali pengadaan-pengadaan yang mangkrak ternyata di daerah-daerah kita itu. Kita minta mungkin ini minta dievaluasi dan perbaiki untuk kedepannya.

Saya kira demikian saja Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Wa'allaikumsalam.

Terima kasih.

Hidup itu ada 2. Satu ada milik kata orang sunda. Milik itu barang yang kita punya tapi belum tentu dinikmati, sawah luas, kapal banyak, mobil banyak, tapi belum tentu dinikmati. Tapi yang terpenting dalam itu rizky. Kalau rizky itu jelas kita nikmati setiap hari, makan. Dan hari ini ada orang yang memang rizkynya lagi bagus. Sedang dapat rizky lagi trending. Orang punya milik tapi tidak punya rizky, kalau dia punya rizky sehingga tetap bertahan di DPR RI Komisi IV.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

*Haturnuhun Ketua,
Sampurasun.*

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya mohon maaf sebelumnya karena dari ruangan sebelah dan saya memang. Ya kesebelah. Karena tadi ini saya memang ada beberapa hal terkait

materi yang diberikan kepada kami, ada beberapa pertanyaan. Saya ada 6 pertanyaan. Saya usahakan sebelum 3 menit selesai.

Terkait dengan Kunspek kemarin Komisi IV Rawas yang mana itu salah satu Kabupaten dari Dapil saya. Saya mohon klarifikasi terkait kesepakatan yang ada, pembangunan balai benih ikan tawar dan bluestok yang akan melayani Pulau Sumatera Pak. Apabila itu betul adanya saya harap ini betul dioptimalisasi Pak, karena pasti ini buat Kabupaten itu juga tumpuan harapan bagi daerah lainnya disitu. Itu yang pertama.

Kemudian yang saya pahami juga beberapa waktu lalu Menteri Kelautan dan Perikanan meresmikan sistem layanan cepat dan sistem informasi kapal ijin daerah. Saya waktu berapa kali mungkin. Pak Sekjen mungkin ingat saya mempertanyakan terkait optimalisasi pelayanan ini, pelayanan perijinan dan lain-lain ya. Apakah tingkat efektifitas dan efisiensi program ini didaerah barat, tengah, timur, dapat dilakukan secara baik. Ya kalau saya tadi baca juga jawaban Bapak terkait perijinan dan segala macam kemarin. Karena saya lihat kemarin juga anggarannya cukup besar sekitar plus minus 6,3 Miliar. Jangan sampai program pengamanan kepada Saudara Dirjen anggaran nanti posisinya aman saja karena saya tidak ingin setiap ada rapat itu nanti terjadi perdebatan yang tidak penting gitu loh. Jadi saya berharap kedepannya supaya kita semua merasionalisasi bahwa kerja kita bermitra ini untuk masyarakat gitu loh. Jadi harapan saya program SILAT dan SIMKADA ini memang sesuai dengan harapan masyarakat keseluruhan.

Kemudian di bahan milik Dirjen Perikanan Tangkap halaman 5, saya melihat adanya program penataan kampung nelayan melalui CSR yang mana berada di 40 lokasi. Di bahan ini tidak dijelaskan dimana. Lokasinya dimana. Begitu juga dengan anggaran yang lebih dari angka 2 Miliar itu.

Kemudian keempat di Dirjen PDS mengenai peningkatan gizi bagi anak-anak untuk mencegah stanting. Saat diperlukan anggaran yang mendukung akan hal itu juga didukung oleh Dirjen yang lain seperti Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap agar ketersediaan ikan segar baik dari laut dan tawar bukan hanya di data kertas tapi dilapangan dengan harga yang terjangkau. Jadi terkait hal ini saya harap program peningkatan gizi yang disertai dengan program logistik ini linear. Jangan tidak balance gitu loh. Jadi useless juga kalau kayak begitu.

Kemudian yang kelima di halaman 5 point 5. Oh sorry, ini di Dirjen Perikanan Tangkap halaman 5 point 5, ada rehabilitasi pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PT Perintis. Volume 26, satuan lokasi anggaran kurang lebih 108 Miliar. Saya minta penjelasannya juga itu dimana. Karena begini, anggarannya kan terbatas ya KKP hari ini, apakah ini sudah se-urgent itu, apakah tidak mungkin untuk yang lebih substansial untuk ke masyarakat Pak Sekjen. Tolong dipelajari lebih lanjut.

Kemudian keenam, masih di Dirjen yang sama di point 20 itu ada observer diatas kapal perikanan. 20 ribu hari layar yang anggarannya 7,7. Saya hanya bertanya sangat simple. Observer ini kalau dalam analogi saya itu berari observing yang mengumpulkan data (observe). Tugas mereka seperti itu. Nah

pertanyaan saya SDM-nya. SDM-nya samakah dengan penyuluh atau beda? Karena kalau sampai sama dengan penyuluh berarti ada double budget, double anggaran. Jadi saya mohon penjelasannya. Saya mohon maaf mungkin kalau tidak sampai tuntas mengikuti rapatnya tapi saya mohon dijawab karena ini agak urgent Pak. Supaya kita sama menjadi mitra yang baik kedepannya.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Ada 2 karakter dalam hidup itu. Ada budak, ada hamba. Kalau budak itu digebukin dulu kemudian baru nurut, baru memperbaiki diri. Kalau hamba itu tidak usah digebuk memberi karena cinta, membangun karena cinta. Saya memahami KKP bukan budak yang budek tapi hamba yang mengabdikan. Tanpa kita berucap dia harus sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan memberi bukan karena terpaksa karena cinta. Kami merkosa itu Pak walaupun kita ejakulasi tetap saja Pak jadi masalah nanti. Jadi saya tidak mau ada pemerkosaan. Tepuk tangan. Tapi karena cinta ini. Ini kita ini saling cinta. KKP untuk masyarakat, kita untuk masyarakat. Itu saja sih, ngapain untuk saling paksa ya. Dan memberi itu bukan besar dan kecil. Ada orang yang besar tidak bisa memanfaatkan rejekinya. Ada orang yang kecil tapi bisa berbagi. Jadi KKP kecil bisa berbagi dengan baik karena KKP adalah budak yang menuju insan firdaus. Ichsan. Tapi sekarang ini. Dan bangsa yang sudah besar selalu merasa dirinya hebat diantaranya Bang dan orang Jerman itu dia merasa bangsa besar bang saariyah. Di Jawa Barat itu kalau orang jadi bangsawan muda itu bernama Arya. Dan saya punya sahabat yang dia hari ini menjadi bangsawan dari Madura namanya Slamet Aryadi.

F-PAN (SLAMET APRIYANDI, S.Psi.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih.

Hari ini suasana sangat berbeda. Kalau sebelumnya itu dipanggil "Slamet Bebek" karena punya bebek Slamet. Sekarang sebagai Arya. Bangsawan yang datang dari Madura Pak. Naik peringkat ini, levelnya sudah naik kelas.

Terima kasih. Hari ini berbicara tentang anggaran maka kami juga akan mengupas sedikit tentang potensi sumber daya alam yang ada wilayah Indonesia yang juga tidak lepas adalah wilayah Madura. Berkaitan hari ini berbicara tentang perikanan dan kelautan. Kami hanya berharap bagaimana

kelautan yang di Indonesia ini bisa untuk dimaksimalkan dan dioptimalkan, lebih-lebih dalam sumber daya alamnya Pak.

Jadi yang pertama, kami berharap kepada Bapak Dirjen yang hadir, Pak Sekjan yang hadir dari Kementerian Perikanan dan Kelautan ini. Yang pertama yaitu adanya perencanaan yang lebih baik Pak dalam mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan yang terkoordinasi. Artinya kami inginkan khususnya para nelayan bisa secara maksimal untuk mengelola sumber daya perikanan, baik dalam perlindungan ataupun pelestarian secara berkelanjutan.

Yang kedua kami harapkan disini tersedianya infrastruktur Pak. Apa pun sarana dan prasarana yang bisa menunjang proses kelangsungan hidup para nelayan khususnya di wilayah Madura.

Yang ketiga, dapat meningkatkan perlindungan secara hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan hak-haknya atas sumber daya alam. Dan yang menjadi pertanyaan kami disini ada beberapa program yang dilayangkan oleh perikanan tangkap. Ketika kami melihat disini bantuan perikanan ukuran 5 GT. Sementara ini wilayah Provinsi Jawa Timur ini khususnya Madura ini tidak dapat kebagian. Jadi pertanyaan saya, apakah Madura ini memang termarginalkan atau memang sebelumnya tidak ada yang mengusulkan Pak. Karena secara geografis Madura ini merupakan potensi kelautannya juga sangat besar Pak. Jadi berbicara kebesarannya itu untuk wilayah laut Madura ini terdiri dari 126 pulau, dengan luas laut sekitar 50.000 km. Jadi sangat disayangkan ketika hari ini kami kemarin menemui pada masyarakat nelayan. Mereka sangat mengeluh Pak, berkeluh kesah karena kekayaan sumber daya alam perikanan yang ada di Madura ini terjajah oleh orang-orang di luar Madura. Laut ... makanya hari ini kami akan menyampaikan aspirasi ini Pak agar Madura juga masuk dari apa yang menjadi program-program dari perikanan tangkap ini Pak.

Yang ketiga, untuk pengelolaan perikanan budidaya di Madura ini secara letak geografis pertanahannya sangat berbeda Pak mungkin. Karena untuk pengolahan. Yang ada pengolahan bagaimana bisa meningkatkan sektor budidaya perikanan, ini dibutuhkan Pak sarana yang memungkinkan seperti alat berat dan sarana-prasarana untuk bisa meningkatkan kualitas budidaya. Ini kebetulan di Jawa Timur saya melihat ada alat berat eskafator ini mudah-mudahan bisa dialihkan untuk Madura Pak.

Sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Terima kasih.

Saya baru dengar seumur hidup orang Madura ngeluh. Orang Madura ini kekayaan terjajah. Padahal orang Madura di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di Jawa Barat banyak, besi orang Madura, sate orang Madura, sampai kita

pergi ke Mekah itu kalau kita tawaf itu orang Madura itu ada. Dia sangat hebat orang Madura itu, karakternya sangat kuat. Saya baru lihat orang Madura memelas ini, saya baru lihat. Nah karena orang Maduranya sudah terpengaruh oleh orang yang senantiasa tersenyum. Kalau senyum ketika bahagia itu biasa, tapi senyum ketika susah itu luar biasa. Dan ini ada orang yang selalu tersenyum selamanya bernama Sumail. Senyum selamanya.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat siang, serta salam sejahtera bagi kita semuanya.

Saya mengapresiasi dulu Pimpinan kita hari ini bisa membikin rapat kita berbeda Pak. Sejuk, tapi tidak keluar dari substansi. Ini point pentingnya ya kira-kira ya. Siapa dulu namanya, kecuali Pak Dedi. Tepuk tangan dulu, applause dulu untuk Pak Dedi.

Sampurasun.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Rampes.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik.

Pak Irjen, Pak Dirjen dan Bapak-Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati. Pimpinan dan Anggota juga yang saya muliakan.

Memang kalau kita lihat dengan anggaran yang cukup minim di tahun ini Bapak/Ibu sekalian, itu sangat berat untuk mengalokasikan pada tempat-tempat yang strategis dan sangat penting. Tapi saya ingin mencoba untuk menggali. Saya tidak tahu ada di Dirjen mana ini tentang riset and development Pak. Ada dimana? Di PDSKP ya? Badan Riset ya. Hari ini tidak ada. Oh ya mungkin Pak Sekjen bisa memberikan gambaran kepada kita seberapa besar jumlah itu karena ini sangat penting dalam rangka penguatan di industri perikanan maupun kelestarian ikan tangkap. Terutama ikan tangkaplah dan budidaya. Contoh kecilnya adalah di beberapa pemberitaan Pak, ini masih menjadi silang pendapat. Lobster konon katanya itu tidak bisa dikembangkan tetapi di beberapa belahan negara lain contohnya Vietnam dia sudah melakukan langkah-langkah lebih maju dari kita. Masa kita yang 260 Juta orang ini tidak ada yang sepadan dengan dia bahkan melampaui. Ini kan miris, seperti itu. Saya ingin bawa lobster yang sekarang ini menjadi idola kemudian yang mendapatkan ... itu negara lain itu betul-betul bisa dibudidayakan disini. Petani itu terlayani, para pengusaha juga merasa diperhatikan. Itu point yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya melihat dari beberapa Direktorat, Kedirjenan ini masih egosektoral yang ditonjolkan Pak. Saya ingin kedepan ada kegiatan-kegiatan yang terintegrasi. Kaitannya misal, untuk yang di perikanan tangkap. Mereka senantiasa bagaimana supaya hasil tangkapan-tangkapan nelayan itu terus melimpah. Tetapi ada kalanya pada saat-saat tertentu, di musim-musim tertentu, di waktu-waktu tertentu orang nelayan bilang itu apa ya kalau sedang gelap itu. Gelap atau terang itu kalau mereka tidak bisa. Ya yang badai, musim terang, terang bulan, itu kan mereka tidak bisa. Ya dilaut. Apa yang mereka peroleh selama mereka menangkap ikan mereka jual kembali bahkan mereka gadaikan. Nah kita ingin sebuah program, sebuah konsep ini langsung terintegrasikan Pak dengan budidaya dengan tangkap bahwa kita berubah-ubah perilaku nelayan ini. Mereka juga menangkap di laut lepas tetapi mereka juga membudidayakan. Tolong ini menjadi satu kesatuan program yang menjadi perhatian saya kira.

Yang berikutnya adalah tentang Dirjen Daya Saing Pak. Saya melihat bahwa sebenarnya potensi perikanan kita itu sangat besar. Besar sekali. Anehnya ada beberapa item-item produk perikanan itu masih impor. Itu ada di tempat Bapak ya. Oleh karena itu kedepan harus selektif Pak supaya tidak mengurangi pendapatan daripada nelayan.

Yang berikutnya ini karena 2 hari lagi. Saya dengar yang diundang ini Direktorat Jenderal, Pak Dirjen Tangkap. Di hari Kamis kita akaa ke Banyuwangi pak sama-sama. Dan dari Sekretariat juga akan mengumpulkan kurang lebih 100 orang. Minimal kita membawa sesuatu disana Pak, entah asuransi yang bisa kita bagikan, entah kapal yang jumlahnya 5 itu. Kalau pun tidak bisa kita bagikan semua satulah sebagai bentuk oleh-oleh disana. Sebab kalau kita Cuma datang-datang saja kesannya dianggap cerita-cerita saja.

Kira-kira itu Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Di Sunda itu ada tarekan ada Abah Anom, ada tingkatan hidup manusia, iman, Islam, ichsan. Kalau sudah ichsan maka surga adalah seluruh ranah hidupnya dalam setiap hari. Hidupnya jadi senang, damai karena surga bersemayam dalam hatinya maka ini adalah Ichsan Firdaus.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Terima kasih Ketua.

Ketua ini banyak sekali literturnya. Mungkin banyak baca buku ini luar biasa, renungan di gunung Campaka sana tinggi.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Sekjen, Pak Dirjen Budidaya, Dirjen Tangkap, dan Dirjen Daya Saing yang saya hormati, dan teman-teman Komisi IV, Pimpinan yang hormati.

Saya mulai dulu dari Pak Sekjen Pak. Pak Sekjen, saya mau tanya tentang masa depan SKPT ini Pak. Saya khawatir. Ada 15 SKPT ya Pak ya di Indonesia. Ini masa depannya seperti apa? 5 tahun jangan sampai kemudian ada program yang tidak berlanjut Pak. Sering sekali ganti Menteri ganti kebijakan. Nah kalau memang SKPT menurut analisis, saya minta evaluasi terkait dengan SKPT selama 5 tahun ini. Karena sepengetahuan saya ini kan koordinasi semua sama Pak Sekjen kan walaupun kemudian ada operasional di kelola oleh para Dirjen-Dirjen yang lain. Saya minta evaluasi tentang SKPT ini, apakah kemudian SKPT ini bisa dilanjutkan atau tidak? Kalau memang tidak dilanjutkan apa solusinya, nanti kita coba cek. Karena nanti pada saat kita Raker dengan Menteri Perikanan dan Kelautan kita ingin mengambil kesimpulan apakah SKPT ini layak dilanjutkan atau tidak. 15 SKPT-nya Pak. Jangan sampai kemudian Tahun 2020 SKPT ini kita lanjutkan tetapi ternyata manfaatnya memang tidak ada Pak misalnya begitu, saya tidak tahu. Sepengetahuan saya SKPT ini kan konsepnya integrated series industry kalau tidak salah ya, salah satunya begitu. Tetapi kalau ini kemudian bisa dilanjutkan yang mana yang dilanjutkan yang mana dari 15 SKPT itu. Nah saya minta evaluasi Pak Sekjen. Laporan tertulis nanti tanggal 24 Februari kita Raker dengan Pak Menteri biar kita sama-sama berdiskusi dengan Pak Menteri. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pak Dirjen Budidaya. Sepengetahuan saya Pak, Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita harus memprioritaskan budidaya produksi dari sektor budidaya. Tetapi jangan sampai keinginan kita besar tapi kemampuan kita itu lemah. Pak Byakto kemarin saya minta minimum esensial force terkait dengan PSDKP. Nah sekarang saya mau minta tanya sama Pak Dirjen Budidaya, sesungguhnya kalau produksi kita itu 300% meningkat dari sektor budidaya, yang mana atau rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport budidaya ini. Berapa kebutuhan sesungguhnya minimum esensialnya berapa Pak. Hari ini Dirjen Budidaya mempunyai anggaran sekitar, berapa Pak? Saya mohon maaf, mohon ijin Pak. Saya belum melihat terlalu detail karena tidak ada jumlahnya disini Pak. Berapa Pak? 739 Miliar ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Apakah 739 Miliar ini cukup atau tidak pak untuk meningkatkan produksi 300% Tahun 2020 yang diinginkan oleh Presiden dan Pak Menteri. Kalau memang belum bisa berapa sesungguhnya yang realistis, apakah 300% berdasarkan anggaran sekarang atau bisa kita tingkatkan tapi anggarannya berapa Pak? Termasuk juga misalnya budidaya di Pesisir misalnya, tentang keramba jaring apung. Berapa sesungguhnya walaupun ada kegagalan karena memang ada problem kemarin tetapi kalau memang kita bisa

tingkatkan berapa sesungguhnya. Termasuk juga revitalisasi tambak Pak, termasuk juga kemudian bagaimana agar bukan hanya peralatan di mata saya tetapi bagaimana ada partisipasi masyarakat terkait budidaya ini. Saya minta anggaran berapa jumlah Pak yang bisa kita support walaupun anggaran ini memang terbatas tetapi berapa minimumnya Pak yang kita bisa support untuk itu. Mau mulai KJA, mulai dari kemudian bagaimana revitalisasi di UPT. Sepengetahuan saya 5 tahun terakhir ini UPT tidak ada revitalisasinya ya Pak ya. 5 tahun Pak. Bayangkan 5 tahun kita tidak bisa merealisasikan beberapa UPT-UPT, balai-balai pembudidayaan ikan. Nah ini kita minta analisisnya secara komprehensif ya Pak. Secara tertulis boleh.

Saya ijin Pak Pimpinan. Nanti kesimpulannya belum bisa menyetujui karena nanti persetujuan kan tanggal 24 tapi kita bisa menerima saja dulu. Tapi nanti analisisnya itu kita bisa minta.

Terakhir Pak, bukan terakhir. Yang ketiga, Dirjen Perikanan Tangkap. Saya mau tanya Pak, Perment KKP Tahun 2016 itu asumsi stok ikan kita potensi lestari waktu itu berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Yang 2016. Atau sekarang stok ikan menurut ... berapa Pak?

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP:

12,54.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Sepengetahuan saya 2016 itu Kajiskan mengatakan bahwa stok kita itu 6,2. Dua kali lipat kan Pak berarti. Berapa ijin kapal yang dikeluarkan sepanjang Tahun 2015 sampai 2019? Ijin kapal yang dikeluarkan oleh KKP.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP:

Mohon ijin Pak. Saat ini bisa dipantau online di perijinan.com. 5000 lebih Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

5000 lebih. Waktu 5000 lebih itu artinya asumsi stok ikan kita itu sekitar 6,2 Pak. Sekarang stok ikan kita 12,4. Bukan begitu Pak? Ini ada kenaikan 2 kali lipat. Tapi kenapa kemudian ijin kapal kita kok tidak nambah-nambah gitu loh Pak. Atau bukan ijinnya tapi kapasitas kapalnya kita perbesar. Kejadian Natuna itu kan memukul kita. Bahwa kemampuan kapal perikanan tangkap kita itu lemah dibandingkan dengan kapal-kapal tetangga kita China maupun Vietnam Pak. Nah maksud saya, saya minta Pak Dirjen menganalisis berapa sesungguhnya kalau potensi lestari kita ini 12 sekian juta ton itu berapa sesungguhnya kapasitas kapal kita untuk bisa melakukan itu. Saya ijin Pak Ketua.

Terakhir Pak Dirjen Daya Saing, terkait dengan pengelolaan produk perikanan. Saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa mesin atau infrastruktur pengolahan perikanan itu. Itu pengadaannya waktu itu antara 2015 sampai 2019 itu diserahkan kepada Dinas Provinsi. Tetapi saya dengar itu ada yang mangkrak. Waktu itu Pak Dirjen Dilanto waktu itu. Saya tahu itu ada di sekitar Sulawesi Selatan. Saya usul Pak. Saya tidak tahu nanti Pak Akmal bisa memperdalam. Saya usul Pak Pimpinan, kita nanti kunspek kesana untuk mengecek apakah kemudian berfungsi atau tidak. Bukan dalam rangka mencari kesalahan tetapi bagaimana kemudian kita memperbaiki pola. Pola pengadaan atau pola kebutuhan yang perlu kita lakukan agar kemudian itu efektif Pak untuk bagaimana caranya itu bermanfaat bagi publik dan bagi masyarakat terutama bagi para petani ikan dan nelayan.

Itu saja Ketua.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Terima kasih.

Seluruh rangkaian pertanyaan sudah selesai. Kita break sampai pukul 14.00 dan 14.00 nanti Pak Sekjen dan para Dirjen memberikan jawaban. Kita istirahat selama 30 menit.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DISKORS SELAMA 30 MENIT)

SEKJEN KKP:

(suara rekaman terputus) pada saat ini Tahun Anggaran 2020. Kemudian selama sesi pertama tadi kami juga berterima kasih bahwa Ibu/Bapak sekalian memberikan perhatian yang demikian tinggi, demikian besar kepada sektor kelautan dan perikanan dan sekaligus memberikan dukungan agar supaya kegiatan penajaman program Tahun 2020 bisa dilaksanakan untuk mendukung pengembangan potensi perikanan budidaya yang demikian besar dan terbuka untuk selalu dan terus dikembangkan.

Terkait dengan Sekretariat Jenderal, Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati. Perlu kami sampaikan, yang pertama menjawab apa yang telah disampaikan oleh Pak Slamet.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Pak Slametnya ada?

Slamet mana?

SEKJEN KKP:

Pak Slamet.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Dijawab yang ada saja Pak.

SEKJEN KKP:

Baik.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Dilewat saja yang tidak ada. Langsung.

SEKJEN KKP:

Pak Darori ada. Terima kasih Pak Darori. Maturnuwun, terima kasih atas masukan Pak Darori, dukungan Bapak kepada pengembangan kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar supaya UPT-UPT kami yang didaerah juga memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih besar, lebih tinggi sehingga bisa duduk bersama dengan kawan-kawan yang ada didaerah. Untuk hal ini Pak Darori perlu kami laporkan bahwa KKP sudah menyampaikan rencana ini. Beberapa Eselon I sudah mengusulkan dan kami sudah melakukan beberapa kali Rapat Koordinasi dengan Kantor Menpan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah selesainya transformasi birokrasi terkait dengan Eselon III dan IV maka nanti akan masuk membahas kelembagaannya. Mudah-mudahan atas dukungan Bapak yang diberikan terus menerus kepada kami, mudah-mudahan transformasi struktural ke fungsional sesuai dengan arahan Bapak Presiden bisa kita laksanakan di tahun ini juga.

Terima kasih banyak Pak Darori.

Kemudian yang kedua saya mohon ijin menyampaikan tentang penyuluh bantu yang disampaikan oleh Bapak Muslim. Terkait dengan petugas penyuluh bantu. Selama ini kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Kemenpan. Namun demikian ada beberapa tahapan yang harus kami lalui antara lain melengkapi adanya analisis beban kerja para penyuluh serta peta jabatan. Dan saat ini oleh kawan-kawan BRSDM dibawah Syarif Wijaya terus melakukan konsolidasi untuk menyiapkan kedua hal tersebut, analisis beban kerja dan peta jabatan sehingga kedepan kami mohon dukungan dari Ibu/Bapak sekalian dari Komisi IV agar supaya pada penerima CPNS yang akan datang kita bisa mendapatkan informasi khusus bagi kawan-kawan dari petugas penyuluh bantu yang jumlahnya lebih dari 2000 orang selama ini.

Terima kasih banyak Pak Muslim.

Kemudian ke Pak Andi Akmal. Pak Andi Akmal mohon ijin.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Tidak ada. Dilewat saja Pak.

SEKJEN KKP:

Mohon ijin Pak Ketua.

Oh Pak Slamet. Terima kasih banyak Pak Slamet.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Silakan.

SEKJEN KKP:

Terkait perhatian Bapak yang Bapak berikan kepada alokasi anggaran dukungan manajemen di Sekretariat Jenderal. Perlu kami sampaikan yang pertama terkait dengan ruang kontrol terpadu. Ruang kontrol terpadu Pak Slamet dan Bapak/Ibu sekalian, saya mohon dukungan agar supaya kami bisa melaksanakan dan memanfaatkan ruang kontrol terpadu yang akan mampu memonitor semua aktivitas disetiap ruangan dan halaman seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kira-kira bentuknya seperti cctv. Itu akan kita tempatkan di beberapa tempat untuk memastikan agar supaya keamanan serta kedaruratan apabila ini terjadi maka kita bisa dengan cepat untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih besar. Oleh sebab itu kami mohon dukungan ruang kontrol terpadu betul-betul kami butuhkan saat ini.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembangunan sarana olahraga di kantor KKP. Perlu kami sampaikan Pak Slamet, bahwa rencana pembangunan sarana olahraga di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan ini karena keterbatasan lahan sehingga sport center bagi KKP ini akan diatas ballroom yang selama ini tidak disiapkan konstruksi khusus untuk kegiatan olahraga. Dengan demikian kami akan menyiapkan konstruksi tambahan tanpa harus membongkar gedung yang sudah ada saat ini. Sementara sport center tersebut akan bisa melayani berbagai jenis olahraga sekaligus. Kita akan melakukan optimasi disamping untuk pegawai dan masyarakat serta event lainnya, ini ada beberapa cabang olahraga yang bisa memanfaatkan dilahan yang sangat terbatas diatas gedung ballroom yaitu untuk basket, bola volly, bulutangkis, tenis meja, panahan, kemudian aerobic bisa dilaksanakan di lantai 3 ... tersebut.

Demikian Pak Slamet yang bisa kami sampaikan.

Pak Ketua, saya mohon ijin kalau boleh ijin ke Pak Ichsan Firdaus.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Ya silakan.

Pak Ichsan, fokus.

SEKJEN KKP:

Terima kasih Pak Ichsan atas dukungan terhadap permohonan SKPT selama ini. Bahwa tujuan awal dari dibangunnya SKPT di 15 lokasi ini seluruhnya lokasinya memang betul-betul berada di wilayah yang ... yang jauh dari hiruk pikuk kegiatan ekonomi. Dengan harapan apabila SKPT itu bisa dilaksanakan secara terus continues kedepan harapan kita akan bisa menumbuhkan *trickle down effect* dampak lanjutan dari berkembangnya kegiatan perikanan di 15 tahun hal tersebut. Kami betul-betul menyadari bahwa dalam pembangunan SKPT selama 5 tahun masih banyak hal yang masih belum kita capai terutama keinginan kami untuk bisa melakukan ekspor langsung produk perikanan dari masing-masing lokasi SKPT. Apabila hal ini bisa dilakukan maka kita masih harus memperhatikan terkait sarana-prasana pelabuhan ekspor, status aset. Status aset juga demikian. Sebagian masih milik Pemda. Dukungan infrastruktur yang belum maksimal seperti jaringan listrik, internet, akses dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak Ketua, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, SKPT 5 tahun kedepan akan kita kerjakan bersama dengan kawan-kawan Kementerian dan Lembaga terkait. PUPR, ESDM, koperasi UKM, semuanya akan kita gandeng untuk masuk menyelesaikan 15 SKPT tersebut. Sementara untuk penguatan program SKPT kita juga sudah mengetahui Bapak/Ibu sekalian, bahwa Pemerintah Jepang telah memberikan hibah langsung di 6 lokasi SKPT yaitu SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT Samlaki Aceh, SKPT Biak Papua, SKPT Morotai di Maluku Utara, dan SKPT Moa untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan nelayan dan usaha pengolahan. Saatnya nanti Pak Ichsan, kami mohon waktu mohon kesempatan untuk bisa menyiapkan paparan tentang evaluasi pembangunan di 13, bukan di 15 SKPT. Dan terima kasih Pak Ichsan Firdaus telah memberikan perhatian untuk SKPT. Dan mudah-mudahan kedepan 15 SKPT betul-betul bisa dijadikan sebagai triger untuk lokasi lainnya yang masih demikian banyak yang akan kita upayakan agar hal sejenis di 13 lokasi itu bisa dikembangkan di beberapa lokasi lainnya.

Demikian Bapak Ketua. Kami menyampaikan beberapa tanggapan. Dan tentu kami berterima kasih atas segala masukan terkait dengan usulan perubahan alokasi anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 ini.

Selanjutnya apabila masih ada waktu kami mohon diberi kesempatan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua,

Pak Sekjen,

Terkait dengan SKPT saya minta begini Pak Sekjen. Dalam melakukan evaluasi itu kan sudah ada desain rencana. Lalu kemudian ada daya dukung dari Kementerian lain walaupun memang KOR ininya ada di kelautan. Penanggung jawab utamanya. Nah dari desain 15 itu mana yang. Kan desain itu pasti ada start, ada finish, ada yang sudah oke clear ya. Dan itu sumber anggarannya kan dari APBN plus hibah. Nah selama ini kan kita belum tahu hibahnya berapa. Artinya begini, apakah cukup tidak perlu pakai APBN tapi pakai hibah saja misalnya, berapa yang dari 15 itu yang sudah finish. Sudah selesai, dianggap selesai. Itu nanti kan pakai ininya tertulislah ya. Nah tertulis itu kami minta, artinya dari 15 itu yang betul-betul selesai itu 5 tahun ini berapa. Kemudian yang hanya perlu pakai hibah berapa, APBN berapa begitu Pak. Saya hanya minta tertulis saja. Tidak usah dijelaskan sekarang-sekarang. Saya tahu Pak Sekjen tidak bawa bahan untuk itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Silakan. Ibu mau pendalaman.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Interupsi.

Karena pertanyaan saya belum ada yang dijawab Pak.

Terima kasih.

SEKJEN KKP:

Baik.

Terima kasih Bapak Ketua.

Ibu, perlu kami laporkan bahwa beberapa pertanyaan yang disampaikan bukan hanya Ibu tetapi beberapa Ibu dan Bapak lainnya juga menyampaikan menyinggung beberapa hal terkait dengan tugas pokok dan fungsi BRSDM (Badan Riset dan Pengembangan SDM), kemudian Dirjen PRL, PSDKP. Ini menjadi catatan kami dan akan kami sampaikan kepada Beliau semuanya dan Inshaa Allah akan dilaksanakan RDP-nya pada hari Senin minggu depan. Sehingga sekaligus semua catatan dari Ibu akan kami sampaikan kepada Beliau semuanya. Sehingga pada saatnya nanti akan diberikan jawaban secara langsung.

Terima kasih Bu.

Demikian Pak Ketua. Mohon maaf lebih lanjut.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Tidak ada yang disampaikan lagi?

Sudah.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya paham Bapak akan menjawab nanti. Tapi tadi pertanyaan saya yang terakhir Pak. Saya Cuma minta supaya linear pemikiran saya dengan Bapak-Bapak sekalian yang terkait observer itu. Itu saja. Saya butuh itu dulu. Jangan sampai nanti ada miscommunication juga, apakah betul observer itu. Bukan ya. Oke. Berarti apakah SDM-nya ada kemungkinan sama atau berbeda. Itu saja. Saya butuh itu. Tolong dijawab secepatnya Pak.

SEKJEN KKP:

Terima kasih Bu Riezky.

Pak Ketua mohon ijin.

Pak Dirjen dikarenakan untuk bisa menjawab.
Silakan.

DIRJEN:

Mohon ijin Pak Sekjen.

Mohon ijin Pimpinan.

Mungkin saya langsung merespon saja khususnya terkait dengan beberapa pertanyaan yang mungkin perlu diklarifikasi lebih lanjut dari Ibu Riezky Aprilia. Apakah observer on board dilakukan oleh penyuluh perikanan? Itu tidak. Jawabannya tidak. Jadi penyuluh itu berada di fungsi BRSDM sementara untuk observer on board ini adalah penugasan-pengawasan khusus yang dimana para pelaku observer ini dinaikan diatas kapal untuk khusus menghitung pendataan-pendataan kapal. Ini merupakan mandat dari ... yang juga sudah diakomodir didalam berbagai peraturan-peraturan kita, baik Perment, maupun juga Perment yang ada. Kemudian ini menjadi mandat dari resolusi tuna RFMO dimana kita menjadi anggota dari RFMO. RFMO itu adalah Regional ... Manajemen Organisation, dimana kita 3 RFMO kita menjadi

anggota disitu. Kita menjadi anggota karena ada ikan-ikan yang bermigrasi dari berbagai lokasi, misalnya tuna. Tuna itu berbagai negara menjadi anggota disitu, terbentuklah RFMO. Dimana mulai kuota, negosiasi, proses, pendataan, stok, data, segala macam ini harus didiskusikan bersama-sama. Makanya dari isini juga pembiayaan RFMO kita dialokasikan untuk memastikan Indonesia itu menjadi bagian penting dari RFMO sehingga kita mempunyai hak untuk mendapatkan kuota, menentukan kuota, menangkap ikan. Sehingga ini akan memberikan manfaat bagi para nelayan-nelayan kita.

Mungkin itu Bu secara singkat yang kami sampaikan terkait dengan observer ini.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Ibu Riezky masih?

Masih ada riezky baru silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Berarti saya simpulkan, individualnya berbeda ya. Berarti butuh pelatihan lagi untuk yang ini. Oke.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Masih ada pendalaman?

Silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya tadi saya minta untuk 2 hal. Yang pertama adalah mengenai rumput laut dan yang kedua mengenai pendangkalan di muara sungai, apa memungkinkan KKP bisa masukan dalam program?

Terima kasih.

SEKJEN KKP:

Terima kasih Pak Suhardi Duka.

Pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah rumput laut. Yang kedua adalah pendangkalan sungai.

Mohon ijin Bapak kalau saya boleh merespon yang Nomor 2. Yang Nomor 1 langsung oleh Pak Dirjen Perikanan dan Budidaya.

Untuk pendangkalan sungai. Tentu hal ini akan kita sampaikan nanti pada saatnya kepada Kementerian PUPR Bapak. Apa yang bisa kita lakukan apabila kita melakukan pengerukan atau pendalaman kolam pelabuhan yang itu ada didalam wilayah kerja kami Bapak.

Terima kasih Pak Suhardi Duka, dan silakan Pak Totok seijin Pak Ketua.

DIRJEN PERIKANAN BUDIDAYA (Dr. Ir. SLAMET SOEBJAKTO, M.Si.):

Baik.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Pak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Sebentar, Ibu Luluk mau menemui tamu istimewanya.

Dipersilakan Bu.

Iya dengan senang hati. Oh ternyata WA langsung ya. Mudah-mudahan Ibu bahagia diluar sana.

DIRJEN PERIKANAN BUDIDAYA:

Pak Ketua kok perhatian betul sama Ibu Luluk.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Kita harus memperhatikan sama orang-orang yang hidupnya sendiri Pak.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Pak Ketua, ada juga yang lain. Siapa yang perhatian nanti.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Yang sebelah lagi memang kita fokus dari tadi. Tapi katanya janur kuningnya mau melengkung. Kita menghormati orang lain yang masih jomblo.

DIRJEN PERIKANAN BUDIDAYA:

Ijin Pak Ketua saya melanjutkan.

Yang pertama, saya kira Bu Endang. Jadi tadi saya kira usulan Bu Endang kami terima dengan baik Bu. Sangat luar biasa. Kami akan melakukan komunikasi yang baik dengan pembudidaya ikan hias sekaligus eksportir Bu,

karena ini juga memang sasaran kami sebetulnya ingin menjadikan ikan Nomor 1 didunia karena memang potensinya luar biasa. Dan saya kira mohon support dari Ibu. Mungkin suatu saat juga pada saat kami melakukan komunikasi kami akan mengundang Ibu untuk memberikan pencerahan dan semangat kepada pembudidaya ikan hias.

Yang kedua terkait dengan bantaran sungai Citarum. Memang ada program Citarum Harum Bu. Kami di KKP sudah melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan belum lama kemarin Pak Luhut, Pak Menko Kemaritiman melakukan Rapat Koordinasi terkait dengan Citarum Harum. Dan sudah cukup banyak kemajuan-kemajuannya. Termasuk juga untuk manajemen KJA di perairan umum memang sekarang dalam tataran tahapan untuk pengurangan keramba jaring apung Bu. Dan yang kedepan kami di budidaya ini sedang mendata kira-kira berapa sih pembudidaya-pembudidaya yang nanti akan di relokasi ke darat. Nah kami sedang bekerjasama dengan Bupati Bandung Barat Bu untuk mengalokasikan lahan nanti disana.

Yang berikutnya saya kira kepada Pak Mindo. Tadi ada 5 saran ataupun keinginan Bapak yang sudah kami catat. Pertama adalah pengembangan cacing sutra Pak. Kami sudah melakukan teknologi cacing sutra sistem apartemen di Balai Sukabumi. Dan ini sudah di lounching dan dalam waktu dekat ini akan menjadi paket-paket bantuan kepada UPR-UPR. Dan ini saya kira sebagai kunci keberhasilan nanti di perbenihan ikan-ikan air tawar khususnya. Jadi ini kami sudah melakukan dan akan kami sosialisasikan lagi.

Terus yan kedua terkait dengan pembiakan belut. Terima kasih. Kami akan lakukan Pak. Kami bekerjasama dengan Badan Riset untuk terus melakukan pembenihan belut kedepan.

Terus yang berikutnya, saya kira sidat ini disarankan untuk memperbanyak segmentasi seperti di gurame. Kami sudah melakukan dan kami ada program sekaligus menjawab Pak Slamet. Di Sukabumi tahun iin kita anggarkan untuk budidaya sidat dengan melibatkan masyarakat di Sukabumi tahun ini. Ya nanti kami dengan Pak Slamet khususnya pembudidaya Pak ya. Baik.

Terus yang berikutnya. Tadi saran-saran yang luar biasa dari Pak Mindo. Kami catat Pak. Jadi nama bio yang ngeflog. Terima kasih Pak. Ini saya kira akan lebih membumi lagi namanya pada masyarakat dan akan kami lakukan. Karena bio yang ngeflog ini bukan saja kepada lele sekarang Pak, kepada patin, kepada nila, kepada udang juga kita lakukan prinsip-prinsip bio yang ngeflog ini.

Terus yang berikutnya rumput laut. Saya kira ini sekaligus menjawab bahwa rumput laut kauler yang mode anggur itu. Anggur laut. Itu sudah dibudidayakan dan bahkan kami di Balai Takalar itu sudah menginisiasi untuk ada proses depurasi. Jadi pembudidaya-pembudidaya kauler atau anggur laut atau di daerah Jepara dikatakan latoh Pak. Itu memang bisa dimakan langsung dan sudah dikembangkan oleh para pembudidaya dan ini sudah ekspor segar. Termasuk juga ada yang kemasan-kemasan yang sudah siap untuk dimakan

Pak. Ada kemasan-kemasan. Mungkin nanti suatu saat kami akan coba kirimkan ke Bapak sampelnya.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Dengan senang hati.

DIRJEN PERIKANAN BUDIDAYA:

Sampelnya ada.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Silakan Pak Mindo.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Sekarang pengalaman kalau kolam bulat 2 meter, diameternya kan 200 kilo. Iya toh. 3 meter 300 kilo sekali panen untuk lele. Iya? Nah itu kan baru mengandalkan flognya. Bio. Flognya yang baru diandalkan. Oksigennya masih terbatas. Sekarang kan sudah ada teknologi nano mable. Nah saya kira dicoba itu supaya bisa diseminasikan, kita berikan juga contohnya nano mable itu. Saya menduga itu minimum naik 50% yang diameter 2 saya yakin bisa menjadi 300 kilo, dengan nano mable ikan mas sudah jadi bisa disitu tidak harus air mengalir. Karena ini soal oksigen. Nano mable. Manfaatkan nano mable yang bulat begitu. Itu luar biasa nanti produksi nasional kita. Tidak menggantungkan kepada jirata, tidak menggantungkan yang merusak Danau Toba. Kan begitu ya. Itu salah satu menyelesaikan masalah keramba di danau. Tolong dibuatkan Pak. Saya sedang membuat itu. Jangan lebih dulu saya berhasil nanti. Malu kita.

Terima kasih.

DIRJEN PERIKANAN BUDIDAYA:

Terima kasih Pak Mindo.

Jadi terkait dengan nano mable ini nanti kita akan padukan Pak untuk yang bio yang ngeflog ini. Karena memang nano mable itu juga meningkatkan kadar oksigen bisa sampai 8 bahkan kalau ada oksigen murni bisa 32 Pak. 32 ppm. Jadi ini memang luar biasa. Terima kasih. Akan kami aplikasikan dan sosialisasikan.

Terus yang berikutnya saya kira. Bu Luluk tadi sudah keluar.

Terus yang berikutnya Pak Suhardi Duka. Jadi ini terkait di Sulawesi Barat. Rumput laut Pak kami siap. Memang kami sekarang mengembangkan kebon bibit rumput laut, kultur jaringan Pak. Jadi kami sudah alokasikan juga disana untuk kita bantu karena kami tahu bahwa Sulawesi Barat penghasil rumput laut kotoni yang sangat tinggi. Jadi kami menunggu nanti usulan Bapak

di Kabupaten mana yang kira-kira akan kita kembangkan kebun bibit rumput laut kultur jaringan tersebut.

Terus yang berikutnya kepada Pak Muslim ya. Oh tidak ada ya Pak Muslim.

Pak Slamet yang Sukabumi Pak. Tadi sudah saya sampaikan. Kebetulan namanya sama dengan saya Pak. Jadi yang Sukabumi saya kira tadi untuk program sidat sudah kami anggarkan tahun ini. Nanti kami akan bekerjasama dengan para budidaya yang Bapak bina disana. Terus yang kedua, terima kasih masukannya terkait dengan Balai Besar air tawar Sukabumi. Nanti kami akan komunikasikan. Dan memang ini saya kira penting agar tidak terjadi persaingan program kita dengan masyarakat Pak.

Yang berikutnya Pak Darori tadi juga saran yang sangat bagus sekali restocking untuk di perairan umum, di waduk, danau akan terus kami kembangkan kedepan. Dan bantuan-bantuan di masyarakat khususnya di Dapilnya Pak Darori tersebut.

Terus Pak Abdullah untuk pakan, kami siap menerima usulannya. Kami sangat setuju sekali. Memang pakan ini menjadi salah satu kendala dan kami ada program juga untuk pembuatan pakan ikan mandiri. Saya kira di Maluku banyak ikan-ikan rucah yang melimpah, bisa kami gunakan untuk bahan baku pakan. Dan termasuk tadi sarannya terkait dengan Bapak angkat terkait dengan pengembangan keramba jaring apung. Ini saya kira saran yang sangat baik sekali akan kita tindaklanjuti.

Terus Pak Muhtaram, ini saya kira terkait dengan 5 waduk dan 61 Pokdakan. Ini kami sudah catat di Madiun untuk di waduk. Saya kira nanti kami punya program untuk restocking ikan-ikan lokal yang ada disana. Termasuk juga untuk bantuan benih kita ada, lele, nila, gurame, patin Pak. Kami tinggal menunggu nanti. Yang jelas Pak Ketua dan para Anggota kami sudah mengumpulkan TA-TA, tanggal 11 Februari yang lalu kami sedang menunggu untuk usulan-usulan dari Bapak-Bapak sekalian.

Terus Pak Chaerudin. Ini saya kira usulan untuk eskavator di Tasik Selatan Pak. Oh tidak ada Pak Chaerudin ya. Oh maaf Pak. Kami sudah catat Pak untuk usulannya.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Untuk Madura.

DIRJEN PERIKANAN BUDIDAYA:

Madura termasuk juga sekalian juga Pak Slamet kalau tidak salah ya.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Karawang, Purwakarta. Ada juga?

DIRJEN PERIKANAN BUDIDAYA:

Ya silakan nanti diusulkan saja Pak. kami akan lakukan verifikasi ke lapangan.

Terus Bu Riezky di Musi Rawas, saya kira terima kasih atas supportnya untuk pembangunan nanti kedepan Balai Benih dan induk untuk bisa mensupply se-Sumatera. Kami sudah menganggarkan Bu dengan support teman-teman dari Eselon I yang merelokasikan anggaran ke DJPP. Ini juga kami gunakan juga untuk nanti pembangunan di Musi Rawas, tahun ini Bu.

Yang berikutnya Pak Ichsan ya. Saya kira ini luar biasa dukungan terhadap budidaya. Yang jelas keperluan-keperluan yang esensial yang sekarang kami rasakan adalah untuk keperluan peningkatan infrastruktur Pak Ichsan terkait dengan pendangkalan-pendangkalan di daerah saluran irigasi, pertambakan khususnya, di muara-muara tadi juga. Saya kira banyak sekali yang tersumbat pada musim tertentu. Ini juga akan mengganggu aliran air pemasok di pertambakan uang. Terus yang kedua juga benar sekali bahwa di UPT kami memang fasilitasi untuk peralatan ini praktis. Mohon maaf 5 tahun yang lalu ini tidak ada perkembangan. Jadi ini kami juga salah satu kendala juga termasuk peralatan laboratorium untuk meningkatkan daya saing perikanan budidaya khususnya dengan adanya inspeksi dari Uni Eropa ataupun Amerika dan juga lain-lain. Nah ini nanti untuk keperluan-keperluan yang terkait perikanan budidaya kami akan koordinasikan dengan Pak Sekjen, akan kami jawab secara tertulis.

Saya kira demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Silakan Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Dirjen Budidaya,

Saya, ini merasakan tidak tahu dengan yang lain ke Pak Darori selama 5 tahun terakhir di Komisi IV. Tapi program-program kemasyarakatan itu memang perlu ditingkatkan itu Pak. Kemarin kan ada bio flog kalau tidak salah ya. Kenapa sih tidak kita tingkatkan misalnya ini kan problemnya adalah pakan Pak. pakan ikan yang selalu naik. Ini kan ada pakan mandiri ya. Karena saya

tahu di beberapa termasuk pengadaan pelet ikan. Itu Pak coba dipikirkan Pak, kemudian bagaimana juga kami bisa ikut membantu mendorong agar mesin-mesin pelet terus kemudian pakan. Kalau cacing ya, pelet dan sebagainya itu. Mesin-mesinnya itu maksud saya, karena kendala kita ini kan kendala pakan. Harga pakan sudah naik. Hampir 9000 kalau tidak salah Pak ya. Dari 6000 menjadi 9000 atau 10.000 begitu. Nah kalau kemudian kita coba dorong pengadaan untuk itu agar kemudian masyarakat juga bisa terutama para petani ikan. Itu yang pertama.

Yang kedua Pak, ini usulan Dapil juga sebenarnya. Pakan mini. Karena beberapa sentra-sentra perikanan termasuk Subang itu. Kalau di Purwakarta menurut banyak Pak, di Bogor yang paling banyak. Kalau di Purwakarta tidak terlalu banyak ya. Betul Pak Ketua ya?

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Kalau saya tidak perlu terlalu banyak Pak. Sudah cukup. Di Bogor saja yang masih kurang.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Jadi kalau di Karawang kan tambak ya tapi kalau di Bogor ini kan perikanan budidaya darat. Jadi perlu dipikirkan lagi. Kemarin itu sudah ada inovasi menarik, pendirian pabrik pakan mini. Nah kalau itu kemudian itu dikembangkan Pak. nanti kita lihat anggarannya. Siapa tahu anggarannya bisa kita kelola dengan baik kedepan. Tapi tolong diusulkan secara detail, termasuk mesin pelet, kemudian ada pompa air portable. Saya tidak tahu di tambak-tambak kita kan diperlukan juga untuk itu.

Itu saja Ketua.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Ibu silakan.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos, M.Si.):

Baik Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan beserta Anggota yang saya hormati, Pak Sekjen, dan Dirjen beserta jajaran.

Mungkin langsung dari saya. Saya dari Banten II Pak Nur'aeni ya. Kalau melihat dari rencana kerja program-programnya untuk Dapil Kabupaten Serang sepertinya masih minim. Saya lihat kalau untuk program alat tangkap masih belum ada ya, sementara Serang juga luar biasa potensi kelautannya. Disana juga memiliki potensi yang cukup besar yang memang kurang perhatian karena anggaran juga minim baik dari Kabupaten/Kota maupun juga dari Provinsi. Untuk itu saya mendorong kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan ini untuk memberikan juga ya dorongan anggaran lebih perhatian ke Dapil saya kaitan dengan masyarakat nelayan khususnya. Disini saya lihat anggaran ada pembangunan Sarpras UPRHSRT ya. Dari Dirjen Bapak ya. Nah kalau lihat dari lokasi ini lokasinya Kabupaten Pandeglang dan Tangerang. Untuk itu saya mohon dari 2 lokasi ini diarahkan saja ke Kabupaten Serang.

Terus disamping itu juga hal lain yang menjadi persoalan ini kaitan dengan TP higienis juga disana masih kurang ya Pak, bahkan tidak ada. Kalau ada program yang mengarah kesana untuk pembangunan TP higienis supaya masyarakat juga tidak jijik ya, yang pembeli yang melakukan jual-beli ikan dan lain sebagainya merasa nyaman yang akhirnya percaya untuk bisa membeli ikan dan hasil-hasil produknya dijamin dari sisi kesehatannya.

Disamping itu juga alat tangkap yang masih kurang di Kabupaten Serang. Ini juga mohon perhatian dari teman-teman kelautan.

Mungkin itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Ya apalagi?

Silakan Bu Riezky lagi.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Eggak. Pak Mindo dulu.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Eggak berani kalau sama Pak Mindo ya.

Ya silakan.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua, Pak Slamet,

Itu Afrika, Thailand ekspor mereka tentang tepung manggot itu kan sudah besar sekali. Padahal mereka menemukannya karena kerjasama dengan KKP. Kan ngeri kalau gitu Pak. Orang Jerman malah datang kesini, menginvestasi itu. Loh nemunya di Depok kok kerjasama sama kita yang tadinya menggunakan kernel palm oil kemudian kita ubah menjadi sampah tambahkan minyak lemak dari kelapa. Itu mereka berhasil besar-besaran, kita belum ada. Karena itu mungkinkah kalau memberikan, apakah memberikan bibit lele beserta dengan kolam bulat, atau dalam memberikan mesin-mesin pakan mandiri disertakan juga desiminasi teknologi manggot itu tadi ya black soldier fly, kan begitu.

Yang kedua, saya berharap Bapak-Bapak dari Kementerian Kelautan Perikanan bisa kerjasama juga dengan LIPI supaya hasil-hasil penelitian LIPI itu di skill up oleh Kementerian Kelautan Perikanan, contoh misalnya Lemna. Lemna dia mempunyai minimum 37% protein, 37% dry white proteinnya. Jadi protein 37% dry white. Nah tetapi LIPI karena tujuannya hanya meneliti dia tidak bisa mendesiminasikan ke masyarakat. Nah mungkin itu bisa diambil oleh Kementerian Kelautan.

Yang ketiga, yang bakal mengubah dunia jangan sampai kita tertinggal. Saya ingatkan. Saya sampaikan satu kali lagi, yang bakal mengubah dunia adalah pengembangan klorela. Ya klorela 56% up protein dry white. Baru beberapa negara yang menguasai. Rusia, Israel, Taiwan. Nah jangan sampai kita tertinggal. Itu dalam penjelasannya itu air laut dalam bak begitu, produksi klorela airnya jadi tawar. Air tawar juga bisa pengembangan krusela. Dengan penambahan CO2 dia bisa memproduksi 10 kali beratnya setiap hari. Bayangkan bisa untuk pangan, bisa untuk pakan. Mohon teman-teman di Balai Riset itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Terima kasih.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin menambahkan Pimpinan.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya mohon interaktif ya biar kita sama-sama paham.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Langsung saja Ibu saling bertatap-tatapan.

Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya barusan googling tentang penjelasan Pak Dirjen terkait RFMOs (Regional Fisheries Management Organisations). Oke. Nah ini berarti yang saya pertanyakan tadi antara point 19 dengan point 20 itu berarti ada relevansinya gitu Pak? Yang saya tanyakan terkait point 20 tadi observer itu. Iya kan. Maaf ya Pak kalau saya agak sedikit cerewet karena dari kemarin juga saya agak bingung terkait melihat anggaran ini. Karena Bapak kan anggarannya sedikit nih. Kalau kita harapannya sebisa mungkin ini langsung ..., langsung ada impact ke masyarakat. Kita harus efektif dan efisien makanya saya tanya. Tadi saya mempertanyakan terkait point 20 terkait observer, terus ada relevansinya dengan RFMO katanya. Berarti ini 2 yang terkait. Berarti ini eventnya banyak di Luar Negeri dong Pak. Karena saya baca dari tadi di googling mostly event-nya ada di luar. Makanya saya mau make sure nih. Jangan sampai juga ... your money, buat yang tidak penting gitu maksud saya. Karena hari ini masyarakat nelayan sangat membutuhkan kehadiran KKP juga kan. Nah karena ini terkait dengan pertanyaan saya juga sebelumnya. Rehab pelabuhan tadi, apakah mungkin ini dipertimbangkan kembali Bapak-Bapak ada point 5 di halaman 5, kemudian berarti RFMO dan point 20 tadi observer. Saya hanya menyampaikan, namanya kami wakil rakyat disini Pak. Harapannya adalah kita sama-sama bermitra, bekerja untuk masyarakat dengan inovasi-inovasi yang Bapak-Bapak miliki. Itu saja. Saya mohon apabila memungkinkan. Ya karena saya kan mungkin membaca, dari tadi saya bolak balik makanya RFMO seperti apa, teknisnya seperti apa, apakah eventnya banyak di Luar Negeri karena ada beberapa event yang banyak diluar negeri itu impactnya yang kita tanya. Impactnya untuk langsung direct ke masyarakat itu kira-kira ada atau tidak. Itu penting juga. Terkait rules apa pun itu ya pasti kita taat kalau ini-itu saja Pak. Saya memohon mungkin akan lebih clear apakah Bapak mau langsung jawab atau tertulis itu lebih baiknya dijelaskan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Silakan Mas.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.H.):

Terima kasih.

Saya dari Banyumas Cilacap Pak. Mungkin saya tidak perlu pertanyaan yang sulit karena ini teman-teman sudah luar biasa. Terima kasih Pimpinan atas waktunya. Pak Sekjen juga para Dirjen.

Pak Sekjen,

Saya hanya menyampaikan saja bahwa di Daerah Dapil saya itu di Desa Singasari Kecamatan Karangloas itu. Dulu disana adalah kelompok tani budidaya untuk gurame itu pernah menjuarai untuk juara nasional di tingkat. Dapat juara II kalau tidak keliru Pak Sekjen. Tapi bahwa akhir-akhir ini 2-3 tahun ini jadi budidayanya ini banyak masalah. Jadi indukannya banyak sering

gampang mati, terus juga anaknya juga gampang mati. Kemarin juga dari Provinsi, Dinas Provinsi, mungkin juga dari Kabupaten sudah melakukan tapi masih tetap sama masih banyak yang mati juga. Kami sangat mengharapkan nanti dari KKP bisa menugaskan ahlinya atau bekerja dengan ahlinya yang nantinya bisa membantu para kelompok tani ini yang mempunyai kesulitan terkait dengan budidaya gurame dan penyakitnya ini Pak Sekjen. Nah tentu kami sangat mengharapkan uluran tangannya, tindak lanjutnya nanti di waktu yang akan datang saya pikir semakin cepat semakin baik Pak Sekjen. Jadi saya ulangi lagi di Desa Singasari Kecamatan Karangloas Kabupaten Banyumas Pak Sekjen.

Itu mungkin sedikit Pimpinan yang kami sampaikan. Dan tentunya kami juga mengharapkan sosialisasinya Pak Sekjen bagaimana, mungkin apakah dari cara mereka mungkin dari perkembangannya ada yang salah atau mungkin dari segi airnya. Atau mungkin dari bibitnya yang sudah, dari indukan ini yang sudah membawa penyakit atau yang lain. Tentu kami sangat mengharapkan tindak lanjut dari KKP.

Mungkin itu Pimpinan yang kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf.

Terima kasih.

Merdeka!

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Ya merdeka.

Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Sebelum kita lanjutkan. Kalau kita ngomong riil memang bisnis, usaha diperikanan terutama air tawar itu memang sebenarnya sulit untuk rakyat biasa. Karena beban yang paling utama itu di pakan Pak Ichsan tadi menyampaikan. Kalau rakyat biasa itu memelihara ikan, itu tidak mungkin. Karena regulasi pakan itu setiap hari dalam setiap bulan cukup besar dengan memiliki resiko gagal panen, dan itu ambruk. Dan pembisnis di perikanan yang tidak pernah rugi adalah bandar pakan. Dimana-mana itu, mau di Cirata, mau Jatiluhur, mau di Jati gede, mau di Saguling, mau dimana pun kalau ada perikanan disitu baik deras, kemudian kolam terapung dan sejenisnya maka yang rumahnya mewah, kaya, istrinya banyak pasti bandar pakan ikan karena mereka tidak pernah rugi. Gagal tetap untung, panen tambah untung. Nah kita ini Doktor banyak, Profesor banyak, perguruan tinggi banyak, eselonisasi tinggi. Nah saya sama dengan pertanian. Kenapa pertanian Litbangnya kalah sama perusahaan-perusahaan pembibitan yang sudah tembus ekspor. Saya nanam yang dari pabrikan itu jauh lebih baik. Tapi kenapa yang Litbang ini tidak menghasilkan. Begitu juga di KKP. Kenapa sih kita tidak bisa membiayai riset, siapa kalau dari ahli Luar Negeri. Yang Luar Negeri kalau di ITB ya itu pede. Bagaimana kita menciptakan pakan yang rakyat bisa membuat sendiri dengan murah. Tidak tergantung terus sama impor. Untuk pakan impor, ininya impor, ininya impor. Masa kita tidak bisa. Apa bikin cacing sendiri, bikin ulat sendiri, bikin apa saja yang penting

gemuk. Pada akhirnya yang relatif sederhana itu adalah petani jaman orang tua kita dulu. Nyimpan ikan di kolam, dikasih dedak, dikasih toilet, dipanen setahun sekali itu yang untung. Tidak pernah kena penyakit, waktu panen ikannya gede dan tidak pakai modal. Ini yang untung. Tapi kalau yang bisnis pembisnis perikanan itu rata-rata ... naik kepuncaknya habis itu jatuh bangkrut. Saya sudah punya teman 20 orang pembisnis perikanan ikan air tawar pakai keramba bangkrut. Sampai rumah pun tidak punya karena dijual dan kemudian bayar hutang. Betul tidak nih? Iya. Selanjutnya bagaimana para Dirjen memikirkan itu. Memikirkan ada 1 proyek yang bisa mengubah sistem peternakan perikanan tanpa biaya yang mahal.

Terima kasih.

SEKJEN KKP:

Baik.

Terima kasih banyak Pak Ketua.

Over view pengalaman Bapak, observasi Bapak luar biasa dahsyat dan itu tentu menjadi catatan kita bersama Pak. Mudah-mudahan untuk 5 tahun kedepan Komisi IV bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mewujudkan solusi.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Ijin Pak. Tidak 5 tahun Pak. Maksud saya, kalau polanya pola proyek itu tidak akan pernah benar. Proyek itu kan anggaran kemudian nanti beli ini, beli ini, beli ini, honor segala macam nanti periksa BPK selesai. Saya lebih baik begini, kalau memang ada peneliti yang bisa mewujudkan ini harganya mahal kita bayar Pak tapi berwujud. Tapi jangan polanya proyek Pak. Lebih baik peneliti dikontrak, dikasih biaya, tidak menggunakan pola-pola regulasi yang seperti biasa.

Terima kasih.

SEKJEN KKP:

Baik Pak Ketua.

Ini akan menjadi catatan bagi kami dan Inshaa Allah kami akan bisa melaksanakan secepatnya.

Terima kasih Pak Ketua.

Ibu dan Bapak sekalian,

Mohon ijin kami bisa lanjut ke Pak Dirjen Penguatan Daya Saing untuk bisa memberikan terutama klarifikasi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan fungsi PDS.

Kami persilakan Pak.

DIRJEN Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dr. Agus Suherman):

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,
Pak Sekjen dan Dirjen.

Ijinkan untuk menyampaikan klarifikasi maupun jawaban atas beberapa pertanyaan dari Anggota Komisi IV DPR RI.

Yang pertama dari Ibu Endang terkait dengan ikan hias. Ikan hias sampai Tahun 2019 alhamdulillah menyumbang ekspor itu 33 Juta U\$. Tentunya harus kita tingkatkan. Dan baru-baru ini Ibu Alhamdulillah Ibu sudah memberikan dukungan. Kami punya sentra ikan hias nasional yaitu Raiser di Cibinong. Itu dibangun Tahun 2013. Kondisi mangkrak tapi sebelum Ibu sampaikan seminggu yang lalu sudah kami bersihkan, rapihkan. Alhamdulillah sudah bisa operasional dan kesempatan mungkin Ibu berkenan untuk meninjau. Ini bagian terpenting juga untuk mendukung Bogor sebagai salah satu sentra ikan hias nasional

Kemudian dalam rangka meningkatkan ekspor ikan hias, kita fasilitasi Bu bimbingan teknis dan memperoleh sertifikat cara karantina ikan yang baik sesuai persyaratan ekspor dan bimbingan teknis juga terkait literasi keuangan bekerjasama dengan keuangan dan OJK. Mudah-mudahan juga Ibu berkenan memberikan arahan kepada para peserta nanti kami undang peserta untuk pelatihan ikan hias ini.

Kemudian mohon ijin Bu Luluk sudah tidak ada. Kami lewati Pak Pimpinan. Kemudian Pak Muslim juga.

Yang berikutnya Pak Slamet, terkait dukungan terhadap gemar ikan. Kami sampaikan terima kasih dan Inshaa Allah untuk daerah-daerah lainnya pada Anggota Komisi IV kami siap untuk hadir dan kemudian sesuai arahan dari Bapak Pimpinan tadi, Pak Wakil Ketua bahwa itu jangan setahun sekali tapi secara rutin. Tentu saja kami sangat positif. Karena di Tahun 2020 target konsumsi ikan kita secara nasional itu 56 kilogram per kapita per tahun. Jadi kalau gemar ikan ini kita tingkatkan. Kemudian juga gemar ikan ini meningkatkan padat karya Bu. Jadi olahan-olahan ini kita dapatkan dari para pelaku usaha disekitar situ kemudian mereka olah, kemudian kita makan bersama. Dan kami akan fasilitasi juga dengan mobil ATI (alih teknologi). Jadi nanti tahun ini baru kurang lebih 10 Tahun 2020 ini. Mudah-mudahan di Tahun 2021 akan naik lagi jumlahnya sehingga mobil ini secara continue, setiap waktu, periodik bisa hadir dilapangan di masyarakat menyampaikan produk-produk variasi olahan dan menikmati bersama. Dan bagian terpenting dengan

para anak sekolah, anak-anak yang terkait dengan program pengurangan stunting.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Ijin.

Stunting bisa tidak gini. Semuanya terkonvensasi misalnya. Kita punya data nih stunting, terus kemudian disitu ada pengrajin ikan. Pengrajinnya dikasih bantuan tetapi dia punya kewajiban untuk ber kirim ikan secara free dalam setiap hari pada anak-anak yang siswanya miskin atau kena stunting itu. Nah itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin paradigma pantai itu berubah. Kita jujur ya suka makan ikan asin. Tapi kalau kita berkunjung ke tempat-tempat ikan asin itu seminggu tidak mau makan itu. Saya suka makan ikan timbang tiap pagi, apalagi pakai pete. Itu paling enak orang sunda itu. Tapi kalau kita berkunjung ke tempat pembuatan pindang pak memang sebulan tidak mau makan Pak. Gitu loh. Bagaimana kita, kita ubah deh bertahap, daerah mana saja, pengrajin mana saja kita ubah jadi higienis semuanya. Ikan asin, pindang, pengolahan karena identik dengan jorok. Nah ini kita ingin tapi disitu nanti tahun depan sudah berubah kita geser ke tempat lain, kita geser ke tempat lain dan juga alokasinya diperbesar agar nanti tercipta citra ini urusan ikan asin sudah memang dibuatnya tempatnya jorok, nanti dipasarnya juga jorok juga. Nah ini barangkali paradigma walaupun jorok-jorok pun dimakan karena memang yang jorok-jorok itu kadang-kadang enak.

Terima kasih.

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Baik Bapak Pimpinan.

Salah satu yang kami siapkan memang pada saat musim ikan. Ikan-ikan dengan ekonomis tinggi seperti tuna itu kadang-kadang kesulitan cari pasar. Sehingga dengan posisi semacam ini ikan-ikan yang kualitas bagus itu memang bisa dikonsumsi oleh para masyarakat kita yang di gunung, yang ditempat-tempat tadi ada dari Wonogiri tidak punya laut. Tapi Inshaa Allah dengan ini kan bisa menikmati ikan tuna. Tetap bisa menikmati udang yang relatif dijangkau di laut dan mungkin didaerah-daerah lainnya seperti Temanggung dan seterusnya itu bisa masuk seperti ini. Inshaa Allah kami coba create. Dan Inshaa Allah di 2021 kami sudah mempersiapkan hitung-hitungan, kalkulasi anggaran yang kalau seandainya didukung dengan anggaran. Tidak sekarang ini misalnya mohon maaf Pak Pimpinan. Hari ini kan 3 sampai, naik 4 Miliar katakanlah. Tapi kami harus bekerja seluruh Indonesia. Oleh sebab itu desainnya kami akan melibatkan BUMN, kami minta tolong mereka untuk membantu mendukung program ini.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Desain ini sebenarnya bisa murah Pak. misal begini, pedagang ikan itu kan keliling. Jadi dia keliling kampung dia sudah tahu rumah ini yang harus pagi-pagi saya harus kirim ikan.

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Itu dibuat seperti itu KKP viral, booming dan bayar ke saya karena gagasan mahal.

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Siap Pak.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua,

Ini kan soal yang baru disampaikan itu kan soal proses. Nah sebelum bicara dengan BUMN apa yang sudah kalian pikirkan prosesnya. Jangan cerita panjang, sampaikan sekarang. Saya mau uji juga, betul tidak pikiran kalian itu.

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ijin Bapak Mindo.

Kami sekarang itu turun-turun ke daerah dan dengan dampingan Anggota DPR sekarang kami lakukan. Jadi produk-produk olahan semacam tadi misalnya pindang mohon maaf, kami kerjasama dengan pelaku pindang. Kemudian pada saat itu saat event saja Bapak karena keterbatasan event itu hari itu ya hari itu saja yang kita beli. Tidak continue Pak.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Itu kan kalau langsung dijual. Ini yang persoalan bagaimana menahan dia seminggu itu tidak busuk gitu kan kira-kira ini. Apa yang dilakukan supaya sewaktu melimpah ikan ini bisa ditahan 1 minggu tidak busuk harganya tidak turun dan higienis. Itu jangan cerita dulu dengan BUMN.

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pak Mindo.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Jadi penelitian kalian harus ada dulu. Secara teknis teruji dulu baru ngajak investor mengerjakannya. Ini sampai sekarang belum kelihatan. Coba deh.

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Bapak.

Jadi satu adalah kita menyiapkan fasilitas untuk rantai dingin terutama untuk cold storage didaerah-daerah yang ikannya banyak seperti di Timur sana relatif luar biasa. Kemarin kami dari Timika Bapak. Ikan sarden itu sangat melimpah. Kemudian kita punya kapasitas cold storage baik itu dari swasta maupun dari kita dari KKP itu total baru 300 ton. Kemudian kita menyiapkan juga koordinasi untuk tol laut supaya pengangkutan sudah dibekukan disana kemudian kita angkut ke daerah-daerah pasarnya. Disamping dengan variant produk-produk olahan yang kemudian sampai di lokasinya di pusat-pusat produk olahan kita olah itu Pak. Inshaa Allah kami lakukan itu.

Kemudian berikutnya Ibu Riezky. Terima kasih dan kami akan lakukan. Salah satunya adalah meningkatkan kinerja logistik ikan nasional. Ada 2 kapal angkut yang statusnya inkrah dan diserahkan kepada kita. Satu kapasitasnya cold storagenya 2300 ton. Yang satu 200 ton. Sedang kami urus untuk bisa digunakan untuk mengangkut ikan dari sentra-sentra perikanan di berbagai wilayah. Pada saat musim-musim tinggi di wilayah timur itu kapal bisa keliling dan kita sekarang susun skemanya kerjasama dengan pihak swasta karena anggarannya terlalu relatif besar. Kalau 2300 beli ikan di nelayan kurang lebih tidak kurang dari 100 Miliar dengan operasinya. Jadi ini kami sedang susun. Inshaa Allah dalm bulan ini paling telat 15 Maret sudah selesai untuk proses yang 2300 ton.

Kemudian Pak Ichsan Firdaus terima kasih. Memang banyak sekali sudah dilakukan pembangunan di beberapa titik, antara lain untuk cold storage itu kami identifikasi baik itu diserahkan ke Pemerintah Daerah dan seterusnya. Itu tidak kurang dari 41 bangunan Pak. Nilainya kurang lebih 101 Miliar dan relatif operasional belum mencapai 20%. Itu yang kemarin kami sudah undang Kepala Dinas untuk mem bahas nya. Kemudian menyiapkan skema kerjasama dengan pihak ketiga atau mungkin dengan koperasi yang bisa memanfaatkan cost ... disamping itu kita juga sudah puluhan unit pabrik rumput laut kita bangun dan memang kondisinya juga baru 1 yang operasional. Padahal itu dibangun di sentra-sentra rumput laut, seperti di Nusa Tenggara Timur, di Sulawesi dan seterusnya ini sedang kami urus termasuk juga integrated cold storage yang termasuk adalah unit processingnya. Inshaa Allah termasuk berikutnya adalah tepung ikan juga kami lakukan. Bapak sudah mengingatkan kami dan kami sudah melakukan ini, dan kami akan lihat ke lapangan bersama Tim kami untuk menuntaskan ini agar operasional sehingga investasi yang selama ini sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah maupun mungkin juga koperasi bisa dimanfaatkan. Itu saja respon yang kami sampaikan.

Terima kasih.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Singkat Pak Ketua.

Tadi Pak Dirjen ngomong pabrik rumput laut di NTT itu dimana Pak? Dimana persisnya Pak?

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Di Bombama.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Sumba Timur?

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ijin. Yang dari KKP ya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Saya ini ada proposal dari Bupati Sumba Timur 4 Pak. Sudah ditandatangani oleh Bupati, Kepala Dinas. Saya ingin langsung kasih ke Menteri sebenarnya. Saya ingin ngomong panjang lebar soal ini Pak makanya tadi saya tanya betul tidak, ini ada proposalnya disini Pak. Nanti pada saat ada Pak Menteri Raker saya akan bicara lebih komprehensif Pak.

Terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Oke Ketua sedikit dengan Dirjen. Sekalian Pak Dirjen, saya ajak Bapak ke salah satu Kabupaten saya tanggal 4 untuk acara gemar ikan itu.

Terima kasih Pak ya.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Gemar ikan. Setuju tidak nanti ditambah jumlahnya? Bila perlu sebulan 4 kali ada gemar ikan di Dapil.

Setuju tidak?

Sebulan 4 kali. Seminggu sekali makan ikan, seminggu sekali yang sehat Pak. Bukan sebulan sekali.

Pak Mindo silakan.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Saya hanya ingin contoh-contoh kecil yang benar, yang bisa itu diperbanyak. Bisakah selama Reses ini DPR RI waktu Rapat Kerja yang akan datang lagi dengan Menteri, Bapak-Bapak telah menunjukkan contoh bagaimana di kampungnya Pak Abua itu membuat ikan asar. Mereka sebut ikan asar tapi tidak higienis itu. Sama dengan di Sulawesi Utara ikan fufu, tidak higienis itu. Ikan asar 4 hari ulap. Begitu juga fufu. Karena apa, karena waktu proses memfufu itu ada lalat. Itu saja Saudara-Saudara berikan contoh itu sudah menaikan daya saingnya mereka. Bisa jadi oleh-oleh dari Ambon, oleh-oleh dari Manado bawa ikan fufu yang aman punya yang higienis karena kehadiran Kementerian Kelautan. Berapa masa kerja, Rapat Kerja 1 kali, 2 kali silakan pak Sekjen, Dirjen, Eselon I nyatakan disini. Berapa lama anda bisa membuat itu contoh. Satu-satu saja supaya higienis itu. Tidak usah cerita panjang kita tapi langsung bermanfaat, konkrit ke masyarakat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Silakan Pak.

Bapak mau bicara?

Silakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Saya mohon maaf tadi ikut Rapat Fraksi nih.

Pak Sekjen, Pak Dirjen,

Dalam RDP yang lalu saya mempermasalahkan nasib nelayan genteng patimba. Dampak daripada pembangunan pelabuhan laut Patimba. Mereka tidak bisa melaut karena alatnya sudah tidak sesuai. Tempat penambatannya juga pendangkalan. Hanya saja di dalam rencana kerja yang saya baca di programnya itu tidak diakses. Mereka minta 5GT. Memang sebagian minta dialihkan aktivitasnya. Ini dampaknya adalah kepada Presiden. Dampak negatifnya. Oleh karena itu minta diprioritaskan untuk dipertimbangkan. Silakan di kontrol, silakan dicek ditempat.

Kemudian yang kedua, saya buka-buka rencana kerja dan program. Rencana anggaran Bapak ini diperikanan tangkap. Ini menganggarkannya atas dasar apa ini? Ada daerah di Jawa Barat tidak punya laut hanya satu-satunya program, dikasih program asuransi nelayan. Di Majalengka, di Kuningan ini.

Justru itu pertanyaan saya adalah apa dasarnya. Apalagi ada ... dari pengaman daya saing Kota Bandung sudah dikasih mobil pendingin roda empat dan roda enam. Padahal hanya terbatas jumlahnya. Kebutuhan itu bukan hanya 1 kota. Ini kan pencerminan penganggaran itu tidak berdasarkan objeknya.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Di Kota Bandung ada tidak perwakilannya disini?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Tidak ada.

Oleh karena itu tolong dicek kembali. Jangan sampai kemudian dibiarkan oleh kita akhirnya ditindaklanjuti.

Kemudian tadi masih tetap dalam konteks penguatan. Disemua daerah itu punya pengolahan. Di Kabupaten Majalengka itu tempat pembuatan pindangnya besar. Itu juga diabaikan. Tolong ini yang menyentuh rakyat kecil dan produknya untuk rakyat kecil ini harus diprioritaskan. Usulannya adalah tolong kembali ke Kantor cek kembali untuk disesuaikan. Prioritaskan program-program anggaran ini yang menyentuh untuk perbaikan hidup rakyat kecil.

Terima kasih.

Satu lagi, saya menyampaikan usulan dari Kabupaten Subang. Sungai muaranya telah terjadi penyumbatan mengganggu lalu lintas nelayan. Itu diantaranya mohon eskafator. Mohon untuk dipertimbangkan proposal yang telah disampaikan ke Kementerian khususnya dari Kabupaten Subang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Terima kasih.

Barangkali ini salah satu bentuk pendalaman kita yang harus dibicarakan secara bersama-sama. Saat ini kan pertumbuhan pembangunan relatif dibuat cepat. Kemudian terjadi diberbagai daerah. Tetapi selalu kan yang ditemukan oleh kita implikasinya adalah implikasi lingkungan. Persoalan nelayan kehilangan tempat hidupnya, kemudian ekosistem terganggu. Terus kemudian yang menjadi problem kita juga adalah menurut saya harus segera disampaikan oleh Pemerintah ditingkat Kementerian Kemenko untuk KKP ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan problem-problem kelautan agar tidak terlalu panjang penyelesaiannya. Misalnya, bikin benteng dilaut, bolehlah. Siapa pun yang mengerjakan kan ujungnya yang mengerjakannya pihak ke-3. Pengerukan dan sejenisnya yang selama ini ada di PUPR. Termasuk rumah nelayan. Karena problem nelayan itu pasti kekumuhan. Rumah nelayan, barangkali ini bisa dibicarakan oleh Pemerintah agar KKP memiliki kewenangan-kewenangan untuk melakukan itu sehingga cepat

penanganannya. Problem di kita ini kan koordinasi antar lembaganya susah. Kayak kita panggil PUPR kan susah. Barangkali itu.

Terima kasih.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih.

Tadi yang disampaikan Pak Dirjen untuk kegiatan fasilitas seperti cold storage dan lain-lain dipertimbangkan apa pihak ketiga atau koperasi. Saya mau ingatkan saja. Kalau koperasi itu kalau tidak salah itu 25 orang. Nah kalau 25 orang itu belum tentu memiliki modal yang kuat. Kalau buat saya, kalau mau koperasi juga harus padat modal. Karena apa? Cold storage harus memiliki modal untuk beli ikan. Modal untuk simpan ikan dan modal setelah pengangkutan ikan ke tempat lain itu modal itu harus selalu siap. Karena kalau saya lihat di Banda kemungkinan juga satu dari KKP kalau tidak salah, itu juga tidak berfungsi. Ya kadangkala berfungsi, kadangkala tidak. Mungkin diberikan untuk koperasi yang tidak memiliki modal. Usulan saya, kalau umpamanya cold storage atau apa yang dimiliki oleh KKP kita ... padat modal. Orang yang memiliki modal. BUMN saja tidak kuat. Ada BUMN kita disana juga. Ikannya sampai di Surabaya sekian lama baru dibayar. Kan juga jadi masalah. Jadi saya kira itu. Lah mungkin tadi saya juga yang satu belum dijawab. Artinya yang saya katakan yang di Bursel (Buru Selatan) itu wilayahnya saya kira masih lampunya mungkin belum. Kalau begitu kalau mau kayak Ambon itu harusnya 1 Kabupaten lagi bagaimana kalau mobil, artinya mobil untuk penampung ikan. Nah ini kan juga agak sulit untuk kesana. Seperti yang saya bilang kalau saya harapkan kalau bisa dan dapat ini harus direlokasi. Saya tidak mengerti perencanaannya dari mana.

Saya kira sementara demikian.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Seluruh pembicaraan relatif sudah disampaikan. Secara prinsip dasar kan bukan dijawab disini tetapi yang paling utama semuanya diidentifikasi kemudian dibuat dalam rencana program yang memadai. Apabila ada kesulitan-kesulitan dalam aspek pembiayaan gasar geser dan sejenisnya bisa kita bicarakan di rapat ditingkat Pimpinan terlebih dahulu agar lebih lebih teknis dengan Kapoksi, termasuk pembicaraan dengan para Anggota Badan Anggaran di Komisi IV sehingga secara komprehensif bisa kita terpetakan dengan baik mengarah pada sebuah kesimpulan agar pertama, nanti kita bacakan kesimpulan formalnya. Aspek kelautan kita, ekosistem dan lingkungannya harus terjaga dengan baik. Kelemahan Kementerian yang lama itu adalah malas belanja tapi rajin mengeksekusi, membakar, menenggelamkan yang membuat rasa takut nelayan asing. Artinya itu

pelajaran baiknya. Pelajaran yang kurang baik adalah lamban dalam belanja. Sehingga yang sekarang lakukan kedua-duanya. Berani mengeksekusi. Kenapa saya katakan “berani mengeksekusi”? Karena saya sudah punya pandangan kalau diproses hukum secara pelanggaran pencurian kapal oleh kapal asing lama dan terornya ke Bapak akan banyak. Dan Bapak akan capek menghadapi tekanan psikologis dari berbagai pihak tanpa harus menuduh siapa pun. Tetapi kalau dibakar langsung, kan gampang cuci tangannya sudah dibakar. Beda kalau proses.

Yang kedua dari sisi internal eksekusi anggaran itu penting. Karena masyarakat membutuhkan regulasi dan effect dari sebuah belanja anggaran Pemerintah. Nah regulasi harus diarahkan pada ketepatan belanja anggaran, mana yang prioritas. Prioritas kita adalah, satu adalah modalnya harus melahirkan multiplier effect pada masyarakat, kedua harus ada edukasi, kemudian yang ketiga adalah harus ada pencegahan dari setiap problem kehidupan masyarakat nelayan tentunya. Ini yang menjadi fokus utama kita.

Yang berikutnya adalah koordinasi antar lembaga seperti persoalan stanting menjadi hal yang sangat penting, dan itu tidak bisa lewat pendekatan proyek tetapi harus pendekatan berkesinambungan dengan menggunakan marketing yang sangat mudah, tukang jualan ikan dari mulai ikan basah, sampai ikan kering, sampai ikan pindang dan sejenisnya yang berkeliling kampung di berbagai daerah diseluruh pelosok dan mereka tidak perlu dibiayai tinggal dititipin. Si A kasih ikan, si B kasih ikan, si C kasih ikan.

Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mengembangkan teknologi pakan yang dimana masyarakat sekali modal kemudian pakan secara terus menerus terproduksi. Sehingga kita mengikuti pola lama. Kalau orang tua kita dulu pelihara ikan itu tanpa modal dengan modal WC umum di kolam. Hari ini barangkali itu tidak dilakukan. Mencari teknologi lain sekali kasih pakan, pakan itu berkembang di kolam itu secara terus menerus sehingga kita tidak tergantung pada pakan. Dan bisnis pakan bisnis yang menjanjikan. Peternak rugi tidak ada masalah. Tukang pakan tetap unggul karena dia tetap mendapat untung. Dan kita mulai membacakan kesimpulan.

Setuju ya?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ketua,

Ijin dulu sebelum kesimpulan.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Apa?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Kanan Ketua.

Saya Cuma ingin menanyakan saja. Jika tadi memang mungkin tanggapan pertanyaan-pertanyaan saya nanti tertulis atau nanti diperdalam selanjutnya. Tapi saya ingin mempertegas lagi sebagai Provinsi yang sudah dinobatkan sebagai lumbung ikan nasional itu progressnya sebenarnya bagaimana. Karena memang sampai saat ini pun saya belum melihat ada atensi yang besar untuk apa yang sudah ditetapkan Bapak Presiden. Mohon nanti juga tolong ditegaskan kegiatan-kegiatannya atau atensi-atensinya kepada 2 Provinsi yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden ini.

Kemudian tadi yang seperti Pak Mindo sampaikan, Pak Abdullah tentang ikan fufu atau dikita bilang ikan asar. Memang kita didaerah-daerah Timur terkenal sekali dengan industri rumahan pengolahan ikan tongkol yang di asar dengan sabut kelapa. Tapi memang betul 3 atau 4 hari itu sudah bisa rusak dan tidak layak dimakan. Mungkin ini juga menjadi atensi yang penting. Bapak, saya ingin juga menyampaikan kami juga penghasil ikan tuna. Kami juga penghasil ikan. Kalau kita di Maluku Utara itu ikan bawal kita bisa bilang ikan mobara, ikan bawal putih, ada ikan kerapu, ada ikan tuna. Ikan tuna itu ada 2 macam, ada yang kita bilang ikan ekor kuning. Ini juga harus kita perhatikan Pak. Tapi selain itu kita ini juga berbatasan dengan negara-negara lain Pak. Tolong diatensi juga untuk perbatasan-perbatasan kita itu, apakah kapalnya, atau kerjasamakah dengan Basarnas, itu memang harus betul-betul ditingkatkan kewaspadaan untuk batas wilayah negara kita. Karena kadang Pak Ketua, mereka pakai bendera merah-putih tapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus juga peraturan dari Pemerintahan, ada yang dari Pusat, ada Provinsi dengan batas laut dalamnya. Kadang kan itu juga harus kita tegaskan. Maksudnya ikan-ikannya juga yang masih kecil dalam dangkal laut itu kan ada batasan kalau Provinsi berapa, dari Pusat berapa. Yang terjadi dilapangan tidak seperti itu. Akhirnya jaringnya itu menangkap ikan-ikan yang masih kecilpun diangkat misalnya seperti itu. Tolong juga diperhatikan sebelumnya.

Ijin juga melalui kesempatan ini Pak. Saya juga dititipkan surat dari Kabupaten Morotai yang Tahun 2019 sudah menyampaikan surat. Sudah ada tanda terimanya dari KKP tapi saya memberikan lagi agar tidak lupa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Disampaikan dari Kabupaten Morotai. Diantar kedepan biar di foto. Di foto untuk diviralkan di Morotai. Moro artinya berburu. Tapi kalau sunda jadi jorok.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Mohon maaf. Morotai. Moro itu artinya Pulau kalau bahasa Jepang Pak.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Kalau di sunda Moro itu berburu. Tainya jadi, tidak cocok itu.

Harus dong, silakan. Penting itu. Menyampaikan surat dari Kabupaten Morotai, Kepulauan Morotai. Semoga ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang nyata.

Salaman.

Tepuk tangan.

Bu Alien keliatan cantik sekarang ini. Saya tidak tahu dapat apa itu loh kemarin.

Bapak tadi baru mau dijawab Bapak keluar.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Eenggak, ada 1 lagi yang belum saya sampaikan ini.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Oh ya boleh.

Setuju enggak?

Eenggak setuju Pak yang lain.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua, ini hak Anggota untuk bicara. Konstitusinya begitu Pak.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Senin rapat lagi Pak. Senin saja.

Setengah menit ya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Iya-iya. Begini Pak Anggota ada hak Anggota untuk bicara. Tidak ada Undang-Undang yang melarang kita untuk bicara apalagi dibatasi.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Saya juga berhak untuk tidak mendengarkan Bapak juga.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Satu saja saya ingin. Dua Pak.

Pertama, itu adalah terkait dengan kelompok-kelompok nelayan atau pembudidaya. Dia itu harus mendapatkan ijin dari Dan itu mempersulit kelompok-kelompok nelayan untuk mendapatkan ijin itu sendiri. Belum lagi harus mendapatkan programnya itu. Saya pikir ini perlu ditinjau ulang dan disederhanakan.

Kemudian yang kedua itu terkait dengan soal nelayan-nelayan di Sumatera Barat itu. Menginginkan bantuan kapal 5GT. Saya Cuma intinya yang nomor 1 itu Pak. Ijin untuk membuat kelompok itu mohon jangan dipersulit.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Terima kasih.

Tadi Bu Alien menyampaikan tentang masih adanya kapal berbendera Indonesia tapi isi awak kapalnya bukan nelayan Indonesia. Kita sepakat regulasi ijin kapal itu dipercepat, terintegrasi. Waktunya juga relatif efektif. Tetapi juga hukuman bagi yang menyalahgunakan ijin perkapalan juga harus tegas. Kalau sudah dikasih ijin untuk awak kapal di kita, kemudian dikasih pada nelayan asing menurut saya ini harus tegas karena ini bertentangan dengan spirit nasionalisme kebangsaan kita.

Kemudian kita kesimpulan.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kesimpulan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan usulan perubahan alokasi anggaran realokasi Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp739.572.614.000,00 menjadi Rp839272.614.000,00.
Setuju?
Oke. Nanti saya ketok.
 - b. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp366.017.696.000,00 menjadi Rp346.017.696.000,00.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Ketua, saya tidak setuju ada "dan". Karena sudah ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Ya silakan dibetulan.

Ya makanya tanya kenapa turun.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

(suara tidak terekam).

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Oh digeser ke budidaya.

Ikhlas gak?

Kita baru menerima belum menyetujui. Kalimatnya kan menerima. Sekarang tanya ke Pak Sekjen.

Silakan. Kan yang teknis disana.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ketua, sebentar Pak.

Itu pergeserannya yang a itu tambahannya 100. Yang dibawah kurangnya 20, yang 80 darimana? Mestinya kan 1 paket.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Dari ini menerima 3 Dirjen. Nanti kan ada rapat lagi dengan Dirjen berikutnya baru kita sinkronisasikan, nanti kalimatnya berubah bukan menerima, menyetujui setelah perubahan Paripurna. Ini sementara oke.

Setuju?

Bapak setuju?

(RAPAT: SETUJU)

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Angkanya juga dipakai tulisan latinnya.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Oh iya. Angkanya kasih tulisan latin. Untung saya bisa baca Triliun-Triliun. Biasanya enggak katanya. Pakemnya begitu. Bakunya Pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Kalau bicara baku saya periode kemarin setiap kesimpulan justru dituliskan itu Pak.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Ya silakan Pak penjelasan. Itu teknis.

Pak Mindo barangkali ada penjelasan?

Urusan kalimat, hurufnya dipakai huruf latin.

Tidak usah Pak. Tidak akan berubah juga.

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan sq Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk dapat segera menyerahkan bantuan Pemerintah (BP) di tingkat sektor kelautan, perikanan kepada kelompok-kelompok atau BUMDES yang mempunyai nilai kelayakan guna peningkatan kesejahteraan pelaku utama, seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar ikan diseluruh Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Setuju?

Bapak setuju semuanya?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan sq. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Daya Saing produk kelautan dan perikanan untuk mengembangkan kelembagaan UFO terbaru disetiap Provinsi dalam rangka optimalisasi pelayanan penyediaan dan pemasaran hasil perikanan. Mengingat sampai saat ini unit pelaksana teknis atau UPT tersebut sangat terbatas atau sedikit di seluruh Indonesia sehingga kedepan akan mendekatkan atau memudahkan pendistribusian benih dan induk ke masyarakat yang membutuhkan serta menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru dibidang pengolah dan pemasaran hasil perikanan. UPT-nya ditambah.

Setuju tidak?

(RAPAT: SETUJU)

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Redaksional saja. Penulisan itu ke depan itu dipisah, dibidang itu juga di dan bidang itu dipisah. Kecuali diikuti oleh kata kerja.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Betulan redaksionalnya. Secara prinsip tidak ada masalah.

4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sq. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk meningkatkan industri perikanan budidaya melalui program yang bersentuhan dengan masyarakat termasuk peningaktan fasilitas sarana dan prasarana budidaya.

Setuju?

Pak Dirjen?

Pak Sekjen setuju?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sq. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk pengembangan penelitian mengenai cacing sutera, belut laut dan sidat. Salah lagi. Ampun.
6. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing produk kelautan dan perikanan. Untuk model cluster di sentra-sentra usaha kelautan perikanan yang berbasis komoditas unggulan daerah guna meningkatkan produksi kelautan dan perikanan disetiap Provinsi sehingga target peningkatan konsumsi ikan di masyarakat sebesar 56,39 kg per kapita di Tahun 2020 dapat tercapai dan ekspor juga meningkat.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nanti redaksionalnya diperbaiki.

7. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sq. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing produk kelautan dan perikanan untuk penguatan anggaran program.
Oke, ada perbaikan tidak?

SEKJEN KKP:

Mohon ijin Ketua.

Terima kasih Pak Ketua.

Mohon ijin baris ke-3 paragraph 6. ... seperti belut laut. "lautnya" dihapus. Kementarian, baris pertama.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Ini sudah setuju?

Sudah?

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Sebentar Ketua.

Kalau kita bicara Nomor 6, bicara inovasi tapi disitu tidak ada pelatihannya. Kenapa tidak ada pelatihan gitu, inovasinya apa gitu? Siapa yang mau dilatih, siapa yang mau diajak inovasi, apakah yang ... inovasi itu KKP sendiri apa rakyat Indonesia. Jadi kan harus jelas.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Jadi pelatihannya ada di Badan ESDM katanya. Hari Senin. Kalau Badan ESDM pelatihannya memang bisa untuk masyarakat? Nanti hari Senin.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Ini terlahir perikanan budidaya dan diseminasikan pada masyarakat. Sudah tercover itu. Diseminasikan kepada masyarakat. Siapa pelaksanaannya nanti tergantung Kementerian. Tapi arahan kita dan didesiminasikan kepada masyarakat.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Setuju?

Nanti redaksional urusan ketik mengetik.

(RAPAT: SETUJU)

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Sorry Pak Ketua.

Memang teknis itu teknis tetapi bisa menjadi substansi kalau tidak langsung mengikat ini menjadi sebuah redaksional. Contoh coba point Nomor 6, setelah kata “untuk” mestinya menurut saya mengembangkan inovasi, bukan untuk pengembangan inovasi. Itu kata kerja yang menunjukkan bahwa kita punya komitmen untuk mendorong ini begitu loh. Ini soal avirmasi.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Ini memang di staf ahli itu selalu mengalimat “pe-“ saya perhatikan. “menguatkan” menjadi “penguatan”. Jadi kebiasaan ini. Harus segera dibenahi.

Jadi senang sama kalimat pe- ini dari tadi. Harusnya me- jadi pe-. Betul kan? Ya betulin saja.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ya maksudnya secara redaksional itu penting. Saya ingin luruskan begitu. Dan penulisan itu ada tata kramanya, ada etika dalam menulis. Dan ini bahasa-bahasa yang ilmiah sebenarnya. Pemenggalan saja tidak boleh salah. Pak Ketua, itu diatas tadi saya bilang "ke depan" ya sudah, tapi yang di- awal-awalan di- itu belum diluruskan. Dan kalau dilepas terus bisa salah. Ketinggal. Maka menurut saya kita rigit saja kalimat per kalimat supaya jelas.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Kita kembali lagi dibaca. Jangan sampai nanti nyerahin draft salah ketik.

Yang ke-6 dulu,

6. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sq. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mengembangkan inovasi budidaya perikanan, seperti belut, sidat, dan.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Kalau setelah seperti itu. Itu seharusnya titik koma (;) supaya menunjukkan seperti itunya sidat, belut dan lain-lain. Tapi sepertinya itu titik koma (;).

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Iya boleh. ... seperti; belut, sidat dan jenis ikan lainnya. Jenis komoditi perikanan lainnya. Karena dari sisi potensi masih sangat belum optimal.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI :

Pak Ketua,

Itu yang Nomor 6 ini kesimpulannya saya titik itu saja (... komoditas perikanan lainnya.) lainnya dihapus.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

... komoditas perikanan lainnya. Sudah cukup segitu. Kan itu berangkat dari tidak optimal dibuat itu.

Oke. Setuju ini?

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sq. Direktorat Penguatan Daya Saing produk kelautan dan perikanan untuk meningkatkan anggaran program gemar makan ikan atau gemar ikan. Dengan memprioritaskan kepada lembaga pendidikan umum dan Pondok Pesantren diseluruh Indonesia agar angka stunting di Indonesia yang masih tinggi.

Ini harusnya begini kalimatnya: memprioritaskan kepada Lembaga Pendidikan Umum dan. Memprioritaskan kepada daerah-daerah yang memiliki angka stunting tinggi melalui Lembaga Pendidikan Umum dan Pondok Pesantren diseluruh Indonesia.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk menambah volume bantuan Pemerintah seperti kapal nelayan, alat penangkapan ikan, permesinan kapal, bahan bakar minyak, benih ikan, indukan ikan, pakan ikan, obat atau penyakit ikan, cold box, ... alat kemasan untuk pengolah dan pemasaran hasil perikanan dan sebagainya (perasaan kok kayak ngawur). Yang diperuntukan bagi pelaku utama perikanan, nelayan budidaya, dan petambak garam.

(... pengolah dan pemasaran hasil pertanian dan jenis kebutuhan kelengkapan lainnya.)

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak, boleh saya kasih masukan.

Jadi Komisi IV DPR RI meminta bla-bla itu subjek. Predikatnya untuk menambah volume bantuan. Objeknya bagi pelaku utama perikanan (nelayan bla-bla-bla) baru dibagian bawahnya ditambah seperti kapal nelayan, alat penangkapan ikan dan seterusnya. Jadi bagi pelaku perikanan itu diatas setelah kata "untuk", "dapatnya" hapus. Untuk menambah volume bantuan Pemerintah.

Saya baca ulang ya, kata "dapat" itu hilang. Perikanan untuk, ya hilang. Untuk menambah cukup efisiensi kata. Persis dibelakang kata Pemerintah, bagi pelaku utama perikanan langsung objek. Sudah. Perikanan (nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam seperti kapal nelayan, alat penangkapan dan seterusnya.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Ketua, bahan bakar minyak terlalu sulit untuk memproteksinya itu. Terlalu luas nantinya.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Ya Pak Sekjen.

SEKJEN KKP:

Terima kasih Pak Ketua.

Yang terkait dengan bahan bakar minyak mungkin bisa diganti dengan SPDN (solar pac dealler nelayan). Ini istilah baku di Pertamina.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Oke masukan.

SEKJEN KKP:

Kemudian ada chest freezer. Bahan bakar minyak diganti huruf semua. SPDN.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Oke. Setuju ini?

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Pak Ketua,

Jadi kalau kita akan bantu banyak itu termasuk bicara pakan ikan. Kalau pakan ikan ya sebenarnya ajarilah mereka. Kita memberikan pembelajaran. Ilmu banyak, orang pintar banyak. Formulanya dibikinkan, mesinnya disiapkan. Mesinnya bukan harus selalu mesin yang kapasitas besar. Apakah mereka produksi sehari 1 ... ataukah sejam 1 kuintal, 2 jam 1 kuintal atau 2 kuintal. Jadi mereka bisa memanfaatkan dengan baik. Dan rata-rata untuk pakan nila kan harus ngambang, harus bisa berenang pakannya. Lah ini tentu kita kan orang pintar banyak. Pelaku ini banyak sekali. Kalau kita pakan saja harus kita bantu, bantunya bukan bentuk pakan jadi dikasih. Tentu kita berikan pembelajaran pendidikan kepada mereka. Eh kamu saya ajari, formulanya pakan seperti ini. Dari Kementerian menentukan bahwa itu sudah diuji, oh ini dipakai diterapkan untuk ikan pertumbuhannya bagus, baik, ikannya juga tahan penyakit, nantinya akan pintar. Biar mereka bisa menjadi pengusaha yang benar. Bukan berarti semua dari A sampai Z kita kasih, kapan nanti kalau sudah tidak dikasih ya sudah mereka akan berhenti. Jadi kita juga harus memberikan pembelajaran bagaimana masyarakat ini jadi pengusaha juga yang cerdas, jadi petani juga petani yang cerdas, petani yang tahan banting juga. Pemerintah ini juga bisa memberikan pembelajaran ilmu juga, bukan berarti hanya diberikan-diberikan tapi sudah jelas bahwa tidak mendidik dengan baik. Wong pakan nila kita banyak tapi tetap kendala itu di pakan. Ajari mereka pakan, formulanya. Ada UGM, ada UNDIP, ada Universitas mana saja, Profesor banyak, ada lulusan Perancis, lulusan mana saja untuk memberikan formula, dan itu diterapkan dibikin KKP. Dan nantinya kalau sudah oke tinggal diberikan kepada masyarakat. Saya kira itu lebih baik Ketua.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Ya bagaimana Pak?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ini yang kesimpulan 8 ini, itu disitu ada kata “seperti”. Seperti itu sebenarnya tidak terlalu mengikat buat kita. Karena itu sangat abstrak. Seperti, seperti apa ya kita bayang-bayang. Jadi konkrit saja. Dalam bentuk yaitu gitu. Kapal nelayan.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Itu bukan dalam bentuk lagi langsung yaitu. Tidak usah pakai “dalam bentuk”. Nah kemudian tadi, pakan Masku yang pintar ini tidak setuju dimasukin.

Bagaimana?

Tetap ada atau tidak ada?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Begini Pak, kalau kita ingin memberikan program terkait dengan bioflog itu memang pembudidaya itu perlu dikasih kesempatan untuk membesarkan ikannya. Tapi pakan ini kita perlu, tapi yang penting itu adalah kualitasnya. Jangan sampai nanti pakan itu hanya sekedar untuk memenuhi kuantitas saja tapi kualitasnya tidak.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Oke. Pakan tetap masuk ya?

Setuju?

Nomor 8 setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Terima kasih.

Selesai kan? Sudah.

Ini dari rangkaiannya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Apa Mas?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Sekjen, 2 kali kesepakatan tidak menggunakan mic-nya. Ini 2 kali, 7 dan 8 karena ini direkam dan di ... Pak. sepihak kita saja yang setuju. Pak Sekjen belum.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Baik.

Pak Sekjen setuju yang ke-7?

SEKJEN KKP:

Setuju.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Yang ke-8?

SEKJEN KKP:

Setuju.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Yang ... setuju tidak?

SEKJEN KKP:

Setuju.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

8?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

(RAPAT: SETUJU)

Padahal ada selain rekaman juga ada video.

Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Delapan kesimpulan sudah masuk dan tepat pukul 16.00

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Interupsi Pak Ketua.

Satu saja tambah Ketua.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Apa lagi Mas?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Saya ingin supaya nanti Pak Dirjen Tangkap untuk mencantumkan kapal 5GT untuk Sumatera Barat.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

... juga saya minta untuk kapal yang 30GT untuk Karawang, Subang, Bekasi sampai Cirebon.

Terima kasih.

Silakan Sekjen untuk memberikan kata terakhir.

SEKJEN KKP:

Baik.

Bapak Ketua, Pimpinan dan Ibu/Bapak sekalian, seluruh Anggota Komisi IV DPR RI,

Terima kasih kita telah menyelesaikan dan menyepakati hasil akhir Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, serta Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan serta saran bagi

peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kelautan, dan perikanan di Indonesia.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI/F-PG):

Terima kasih Bapak dan Ibu.

Kita akhiri dengan mengucapkan, bagi yang muslim Alhamdulillahirrobil'alamin. Dan yang lainnya mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa.

Terima kasih. Rapat ini saya tutup dengan

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sampurasun.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001